

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
A. 3	
B. 4	
C. 16	
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	30
A. 30	
B. 32	
C. 34	
D. 35	
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	39
A. 39	
B. 41	
C. 41	
D. 42	
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
A. 44	
B. 45	
BAB V PENUTUP.....	47

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan sumber daya manusia pertanian dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong regenerasi petani melalui pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan.

Renstra BPPSDMP 2025–2029 dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, serta mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang transformasi sistem penyuluhan pertanian. Penyusunan ini juga mempertimbangkan kondisi aktual sektor pertanian, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan, serta kebutuhan nasional untuk membangun SDM pertanian yang profesional, adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kerja sama dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari unit kerja pusat, UPT pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, mitra pembangunan, hingga para praktisi dan akademisi. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan Renstra ini komprehensif dan aplikatif.

Harapan kami, dokumen Renstra BPPSDMP 2025–2029 dapat menjadi acuan bersama dalam mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional maupun tantangan global.

Kepala Badan PPSDMP,

Dr. Idha Widi Arsanti, SP, MP

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penopang pertumbuhan ekonomi, serta sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Data BPS Agustus 2024 menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 12,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 28,18% dari total tenaga kerja nasional, atau setara dengan 40,76 juta pekerja. Di tengah dinamika global dan tantangan domestik, sektor pertanian tetap menunjukkan ketahanan, bahkan menjadi penyangga utama selama kurun waktu pandemi COVID-19 2019-2023, sebagaimana dicatat dalam pertumbuhan positif sektor pertanian ketika sektor lain mengalami kontraksi ekonomi.

Namun demikian, sektor ini dihadapkan pada sejumlah tantangan strategis. Pertama, ancaman perubahan iklim yang kian nyata telah menyebabkan gangguan pola tanam, kekeringan ekstrem, serta meningkatnya risiko serangan organisme pengganggu tanaman. Kedua, krisis pangan global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, gangguan pasokan akibat perang dan proteksionisme pangan menyebabkan harga beras dunia melonjak, termasuk di Jepang dan Filipina, serta diberlakukannya pembatasan ekspor oleh negara-negara produsen utama seperti India dan Vietnam. Ketiga, tekanan dari sisi permintaan meningkat tajam akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta pemulihan pasca-COVID yang mendorong konsumsi pangan lebih tinggi.

Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi kerentanan pangan yang cukup serius. Sebanyak 7–16% penduduk tergolong rawan pangan dan 21,5% anak-anak mengalami stunting. Hal ini mencerminkan urgensi untuk memperkuat sistem produksi pangan domestik, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM) pertanian sebagai aktor utama.

Sementara itu, sektor pertanian di Indonesia menghadapi persoalan struktural berupa krisis regenerasi petani. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 21,93% petani perorangan berasal dari kelompok usia muda (19–39 tahun), sementara sisanya didominasi oleh petani berusia di atas 40 tahun. Jumlah petani muda usia 25–34 tahun bahkan mengalami penurunan dari 11,97% pada tahun 2013 menjadi hanya 10,24% pada 2023. Demikian pula, petani usia 35–44 tahun menurun dari 26,3% menjadi 22% dalam kurun waktu yang sama. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa generasi muda semakin menjauh dari sektor pertanian dalam satu dekade terakhir.

Lebih jauh, data BPS tahun 2019 mencatat total jumlah petani mencapai 33,4 juta orang, namun hanya sekitar 8% atau 2,7 juta orang yang tergolong sebagai petani muda (usia 20–39 tahun). Sebaliknya, sebanyak 91% petani berusia di atas 40 tahun, dengan mayoritas mendekati rentang usia 50–60 tahun. Selain itu, dalam rentang waktu antara tahun 2017 hingga 2018, tercatat adanya penurunan jumlah petani muda sebanyak 415.789 orang, menandakan bahwa proses regenerasi petani tidak hanya stagnan, tetapi cenderung mengalami kemunduran.

Rendahnya partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi bahwa sektor ini kurang menjanjikan secara ekonomi, serta masih terbatasnya akses terhadap pelatihan yang relevan, infrastruktur pendukung, dan fasilitas pembiayaan yang memadai. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya formasi tenaga penyuluh pertanian, serta belum meratanya infrastruktur kelembagaan penyuluhan di berbagai wilayah.

Akumulasi faktor-faktor ini menghambat upaya revitalisasi pertanian nasional dan memperbesar risiko krisis keberlanjutan di sektor ini dalam jangka panjang.

Menjawab tantangan tersebut, Agenda Pembangunan Nasional 2025–2029 (Astacita) melalui RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor unggulan termasuk pertanian, serta peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diperkuat oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang mendorong transformasi sistem penyuluhan menuju pertanian modern berbasis teknologi, melalui penguatan kelembagaan serta pendayagunaan penyuluh di semua tingkat pemerintahan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) memegang peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) pertanian. Melalui jaringan unit pelaksana teknis yang mencakup Balai Pelatihan Pertanian (BBPP dan Bapeltan), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan dan PEPI), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka), BPPSDMP menyelenggarakan pendidikan vokasi, pelatihan, penyuluhan, literasi pertanian, serta fasilitasi kelembagaan petani. Selain itu, Museum Tanah dan Pertanian (Mustani) turut memperkuat fungsi edukatif BPPSDMP dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah dan peran strategis sektor pertanian. Sinergi antarunit ini menjadi fondasi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelaku utama maupun pelaku usaha pertanian.

Namun demikian, efektivitas kelembagaan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jumlah dan distribusi SDM, serta infrastruktur yang belum merata. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan daya jangkauan dan kualitas layanan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di berbagai wilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, sektor pertanian juga menghadapi persoalan krusial berupa krisis regenerasi petani. Proporsi petani muda masih rendah, sementara sebagian besar pelaku usaha tani didominasi oleh kelompok usia lanjut. Untuk menjawab tantangan ini, BPPSDMP mendorong keterlibatan generasi muda melalui program strategis seperti Brigade Pangan. Program ini dirancang untuk mencetak petani milenial sebagai penggerak agribisnis modern dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi.

Sebagai respons komprehensif terhadap tantangan-tantangan tersebut, Renstra BPPSDMP 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis guna mempercepat transformasi SDM pertanian yang adaptif, inklusif, profesional, dan berdaya saing global. Sasaran akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta peningkatan kesejahteraan petani di tengah dinamika pembangunan nasional dan tantangan global.

B. Potensi dan Permasalahan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha. Mandat ini dijalankan melalui dua fungsi utama: pendidikan pertanian dan peningkatan kapasitas melalui penyuluhan serta pelatihan.

Dalam pelaksanaannya, BPPSDMP ditopang oleh kelembagaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan yang tersebar di seluruh Indonesia, kelembagaan perpustakaan dan literasi pertanian, serta kelembagaan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian yang

didukung tenaga fungsional dan sistem manajemen kelembagaan. Keberadaan infrastruktur tersebut menjadi potensi penting dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian, terutama dalam menghadapi transformasi teknologi dan kebutuhan regenerasi petani.

Namun, BPPSDMP juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pencapaian kinerja. Tantangan ini tidak hanya berasal dari dinamika nasional, tetapi juga kondisi global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Guna mengidentifikasi potensi dan permasalahan digunakan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)

a. Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian

Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian tidak terlepas dari peran kelembagaan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian yang berfungsi secara optimal, yaitu:

- 1) Pusat Penyuluhan Pertanian memiliki wilayah binaan tersebar di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota dan 5.829 Unit Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) tingkat kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia;
- 2) Kelembagaan Pendidikan Pertanian terdiri atas Pusat Pendidikan Pertanian dan 10 UPT Pendidikan Pertanian yaitu:
 - a) Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
 - b) Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
 - c) Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta - Magelang
 - d) Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
 - e) Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa
 - f) Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari
 - g) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong
 - h) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa;
 - i) SMK-PP Negeri Banjarbaru; dan
 - j) SMK-PP Negeri Kupang.
- 3) Kelembagaan Pelatihan terdiri atas Pusat Pelatihan Pertanian dan 10 UPT Pelatihan Pertanian yaitu:
 - a) Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi;
 - b) Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
 - c) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;
 - d) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
 - e) Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku;
 - f) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
 - g) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
 - h) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara;
 - i) Balai Pelatihan Pertanian Jambi; dan
 - j) Balai Pelatihan Pertanian Lampung.
- 4) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
- 5) Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
- 6) Museum Tanah dan Pertanian
- 7) Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

b. Ketenagaan penyuluh, widyaiswara, dosen, dan guru

Kualitas ketenagaan sangat mempengaruhi tingkat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada petani. Untuk itu BPPSDMP memiliki tenaga penyuluh, widyaiswara, dosen, dan guru yang terampil, kompeten dan ahli.

Berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) Kementerian Pertanian bulan Juni tahun 2025:

- 1) Jumlah penyuluh pertanian (PP) secara keseluruhan sebanyak 28 orang dengan jenjang pendidikan S3: 5 orang, S2: 17 orang, dan S1: 6 orang.
- 2) Jumlah widyaiswara (WI) sebesar 205 orang dengan tingkat pendidikan S3: 23 orang dan S2: 182 orang (tidak terdapat WI berpendidikan S1/D-IV dalam data ini).
- 3) Jumlah dosen sebesar 282 orang dengan tingkat pendidikan S3: 107 orang, S2: 174 orang, dan S1: 1 orang.
- 4) Jumlah guru sebanyak 70 orang dengan tingkat pendidikan S3: 2 orang, S2: 50 orang, S1: 16 orang, dan D-IV: 2 orang.

- c. Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.

Regulasi dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam pembangunan SDM pertanian mutlak diperlukan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Regulasi tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 - Undang-Undang Terkait Lainnya
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - b) Peraturan Pemerintah Lainnya (bersifat umum) PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 3) Peraturan Presiden
 - a) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - b) Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - c) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian
- 4) Peraturan Menteri Pertanian
 - a) Terkait Organisasi dan Tata Kerja
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/8/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI).

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup BPPSDMP.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Lingkungan BPPSDMP.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP.
- b) Terkait Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Bogor.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Gowa.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Malang.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Manokwari.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Medan.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Polbangtan Yogyakarta-Magelang.
- c) Terkait Pedoman Teknis dan Pelaksanaan Program
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan SDM Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani).
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Tenaga Kerja Sektor Pertanian.
- d) Peraturan Menteri Pendukung Lainnya
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72 Tahun 2014 tentang Statuta Pendidikan Vokasi Pertanian.
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Sama Penyuluhan.

2. Kelemahan (Weakness)

a. Kualitas dan Distribusi Penyuluh

Terdapat perbedaan jumlah dan kompetensi penyuluh antarwilayah, dengan sebagian daerah telah memiliki jumlah penyuluh yang memadai sementara wilayah lain masih menghadapi keterbatasan. Hal ini berdampak pada variasi intensitas pendampingan dan jangkauan layanan penyuluhan. Ketidakeimbangan ini menunjukkan bahwa perencanaan distribusi tenaga penyuluh masih memerlukan penguatan berbasis data wilayah, jenis komoditas unggulan, dan karakteristik pertanian setempat.

Selain itu, penyebaran pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh juga belum merata. Beberapa wilayah mendapatkan pembinaan rutin, sementara daerah lain belum terfasilitasi secara optimal, khususnya dalam bidang teknologi pertanian modern dan penguatan kelembagaan ekonomi petani. Ketidakteraturan ini membuat kemampuan penyuluh dalam mentransfer inovasi dan membina kelembagaan menjadi bervariasi antar daerah.

b. Regenerasi Petani

Keterlibatan generasi muda di sektor pertanian masih terbatas. Mayoritas petani yang aktif saat ini berasal dari kelompok usia menengah hingga tua, sementara jumlah petani muda masih belum memadai untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Kondisi ini menandakan bahwa upaya regenerasi melalui program-program yang ada belum mencapai skala yang sebanding dengan kebutuhan.

Program fasilitasi seperti Petani Milenial telah berjalan, namun cakupan dan intensitasnya masih perlu diperluas. Integrasi pelatihan dengan dukungan pembiayaan, akses lahan, dan pemasaran belum sepenuhnya terstruktur. Promosi pertanian sebagai pilihan karier yang modern dan prospektif juga masih memerlukan penguatan agar lebih menarik bagi generasi muda, khususnya di daerah perkotaan dan semi-perkotaan.

c. Kelembagaan Petani

Sebagian kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani masih menunjukkan variasi dalam kapasitas kelembagaan. Ada yang sudah tertata dengan baik dari sisi administrasi dan jejaring pemasaran, namun sebagian lainnya masih lemah dalam tata kelola, pencatatan usaha, dan akses ke pasar. Perbedaan ini berpengaruh terhadap kemampuan kelembagaan dalam menjadi pusat penggerak usaha tani anggotanya.

Penyebabnya antara lain intensitas pendampingan yang belum seragam, modul pembinaan yang belum terstandarisasi di seluruh wilayah, dan keterbatasan integrasi pembinaan kelembagaan dengan dukungan permodalan dan kemitraan usaha. Tanpa pembinaan yang berkesinambungan dan dukungan yang terarah, sebagian kelembagaan berisiko tetap berada pada kapasitas yang rendah.

d. Transisi Kelembagaan Penyuluhan

Proses transisi kelembagaan penyuluhan dari daerah ke pusat sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional masih berada pada tahap penyesuaian. Di lapangan, hal ini menimbulkan variasi pemahaman mengenai mekanisme kerja, pelaporan, dan

pembagian peran antarunit. Beberapa wilayah telah menyesuaikan diri dengan baik, sementara wilayah lain memerlukan pendampingan lebih intensif.

Faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan waktu sosialisasi sebelum pelaksanaan transisi, panduan operasional yang belum sepenuhnya seragam, dan kebutuhan penguatan koordinasi antarunit di pusat dan daerah. Keberhasilan transisi sangat bergantung pada keseragaman pemahaman dan kelengkapan panduan teknis yang diterima oleh seluruh pihak terkait.

e. Efisiensi dan Keberlanjutan Pendanaan

Pendanaan program BPPSDMP masih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan prioritas anggaran nasional. Dalam beberapa periode, penyesuaian alokasi menyebabkan perubahan target pelaksanaan, yang pada gilirannya mempengaruhi kesinambungan pencapaian hasil. Tanpa strategi pembiayaan yang berjangka menengah hingga panjang, program strategis berisiko terhenti sebelum mencapai dampak optimal.

Selain itu, pengembangan sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan swasta, CSR, atau hibah internasional belum dimanfaatkan secara maksimal. Penguatan strategi diversifikasi sumber pendanaan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan pada alokasi anggaran tahunan yang sifatnya fluktuatif.

f. Cakupan Pelatihan

Jumlah peserta pelatihan yang difasilitasi setiap tahun masih relatif kecil dibandingkan dengan total populasi petani. Hal ini membuat peningkatan kapasitas SDM pertanian belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang jauh dari pusat kegiatan pelatihan.

Faktor yang mempengaruhi meliputi kapasitas lembaga pelatihan yang terbatas, ketersediaan fasilitator yang belum mencukupi, dan lokasi pelatihan yang belum menjangkau daerah terpencil. Perluasan jangkauan pelatihan, baik secara fisik maupun melalui metode daring, dapat menjadi strategi untuk mengatasi kesenjangan akses ini.

g. Metode dan Evaluasi Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan masih banyak menggunakan metode klasikal yang seragam, padahal kebutuhan petani bervariasi sesuai komoditas, lokasi, dan skala usaha. Metode yang belum terdiversifikasi ini membuat sebagian peserta pelatihan sulit langsung menerapkan materi yang diberikan.

Evaluasi pascapelatihan belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pendampingan di lapangan. Akibatnya, dampak pelatihan terhadap perubahan perilaku usaha tani belum terdokumentasi dengan baik. Penguatan sistem evaluasi dan tindak lanjut diperlukan agar hasil pelatihan dapat lebih terukur.

h. Inklusi Gender dan Kelompok Rentan

Keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam pelatihan masih belum maksimal. Program pelatihan belum sepenuhnya mempertimbangkan jadwal, lokasi, dan metode yang ramah bagi kelompok tersebut.

Selain itu, modul pelatihan yang khusus dirancang untuk kebutuhan perempuan atau kelompok rentan masih terbatas. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial budaya lokal perlu diperkuat agar semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitasnya.

i. Transformasi Digital

Penerapan teknologi digital dalam penyuluhan dan pelatihan masih berjalan secara bertahap. Pemanfaatan platform digital bervariasi antarwilayah, dengan sebagian unit kerja sudah aktif menggunakannya sementara yang lain belum.

Faktor yang mempengaruhi meliputi ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata dan kemampuan literasi digital yang bervariasi di kalangan penyuluh. Perencanaan digitalisasi yang menyeluruh dan pelatihan literasi digital yang merata dapat mempercepat proses transformasi ini.

j. Sistem Informasi

Pengelolaan data penyuluh, petani, alumni pelatihan, dan kelembagaan saat ini masih menggunakan beberapa sistem yang berdiri sendiri. Kondisi ini menyulitkan analisis menyeluruh karena data tidak terintegrasi.

Perbedaan format, variabel, dan platform menjadi hambatan dalam memadukan data yang ada. Pengembangan sistem informasi terintegrasi akan mendukung perencanaan program yang lebih akurat dan berbasis bukti.

k. Adopsi *Smart Farming*

Pemanfaatan teknologi pertanian cerdas seperti IoT, drone, dan sistem pertanian presisi masih terbatas di tingkat petani. Hal ini membuat potensi efisiensi dan peningkatan produktivitas dari teknologi tersebut belum optimal.

Faktor yang mempengaruhi meliputi keterbatasan perangkat untuk pelatihan, kebutuhan investasi yang cukup besar, dan belum adanya program pelatihan smart farming yang dijalankan secara masif. Penguatan peran penyuluh dalam mengenalkan dan mendampingi penerapan teknologi ini menjadi kunci percepatan adopsi di lapangan.

3. Peluang (Opportunity)

a. Dukungan Kebijakan Nasional yang Semakin Kuat

Agenda ketahanan pangan, hilirisasi, dan pembangunan dari desa menjadi prioritas pemerintah 2025-2029. Harmonisasi sasaran Renstra BPPSDMP dengan RPJMN, Perpres swasembada pangan, serta Inpres penguatan penyuluhan membuka akses lebih besar terhadap regulasi pendukung, pendanaan APBN, dan sinergi lintas kementerian.

b. Dukungan Kebijakan Nasional yang Semakin Kuat

RPJMN 2025–2029 menetapkan ketahanan pangan, hilirisasi pertanian, dan pembangunan berbasis desa sebagai prioritas pembangunan nasional. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden yang secara eksplisit menempatkan penyuluhan pertanian sebagai instrumen strategis untuk

mencapai sasaran swasembada pangan. Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penguatan Penyuluhan Pertanian memberikan landasan hukum bagi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan secara terintegrasi antara pusat dan daerah. Selarasnya sasaran Renstra BPPSDMP dengan arah kebijakan nasional ini membuka peluang penguatan legitimasi program serta perluasan dukungan pendanaan melalui APBN.

Keterpaduan kebijakan ini juga menciptakan ruang sinergi lintas kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Bappenas, dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Dengan dukungan regulasi yang kuat, BPPSDMP dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jangkauan pelatihan, meningkatkan kualitas penyuluhan, dan mempercepat pencapaian indikator kinerja yang selaras dengan target nasional.

c. Pemberdayaan Petani Pedesaan dan Hilirisasi Agribisnis

Kebijakan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan petani melalui korporatisasi, pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), serta pembangunan industri pengolahan berbasis desa, membuka peluang strategis bagi BPPSDMP untuk memperluas perannya hingga ke tingkat akar rumput. Pendekatan ini selaras dengan agenda hilirisasi yang menekankan peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan dan pemasaran yang lebih modern.

BPPSDMP dapat mengintegrasikan pelatihan pascapanen, pengolahan hasil, dan manajemen usaha tani berbasis pasar ke dalam kurikulum vokasi dan program pendampingan. Dengan demikian, petani tidak hanya terampil dalam produksi, tetapi juga mampu mengakses rantai nilai agribisnis yang lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi tawar di pasar domestik maupun ekspor.

d. Momentum Regenerasi Petani dan Antusiasme Wirausaha Milenial

Meningkatnya minat generasi muda terhadap kegiatan pertanian, yang terlihat dari partisipasi dalam program Petani Milenial, urban farming, dan kompetisi startup agritech, menjadi peluang signifikan bagi BPPSDMP. Fenomena ini dapat dimanfaatkan untuk memperbarui desain program pelatihan agar lebih sesuai dengan gaya belajar generasi muda, yaitu interaktif, berbasis teknologi digital, dan berorientasi pada kewirausahaan.

Dengan menyediakan fasilitas inkubasi usaha, akses permodalan, dan pendampingan bisnis berbasis inovasi, BPPSDMP berpotensi melahirkan wirausahawan muda yang tidak hanya produktif, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam modernisasi sektor pertanian. Upaya ini sekaligus memperkuat keberlanjutan regenerasi SDM pertanian di tingkat nasional.

e. Akselerasi Digitalisasi dan Pertanian 4.0

Perluasan infrastruktur internet pedesaan, penurunan harga perangkat teknologi pertanian seperti sensor *IoT* dan *drone*, serta meningkatnya ketersediaan aplikasi smart farming, memberikan peluang besar bagi BPPSDMP untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem penyuluhan dan pelatihan. Agenda transformasi digital pertanian juga telah

menjadi bagian dari strategi nasional melalui pengembangan platform *e-government* sektor pertanian.

BPPSDMP dapat memanfaatkan peluang ini dengan memperluas implementasi e-learning, penyuluhan virtual, dan demplot teknologi presisi yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi berbasis data secara real-time. Integrasi teknologi ini akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memperluas jangkauan pelayanan penyuluhan hingga ke wilayah terpencil.

f. Kenaikan Permintaan Pasar Domestik dan Global

Pertumbuhan populasi, perubahan pola konsumsi menuju produk sehat dan organik, serta tren keberlanjutan mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas pertanian berkualitas tinggi. Di sisi lain, peluang ekspor semakin terbuka seiring dengan naiknya harga beberapa komoditas di pasar internasional.

BPPSDMP dapat mengarahkan program pelatihan untuk membekali petani dengan keterampilan memenuhi standar mutu, sertifikasi produk, dan manajemen agribisnis ekspor. Dengan strategi ini, petani binaan memiliki daya saing yang lebih tinggi baik di pasar domestik maupun global, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi nasional.

g. Peluang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama sektor pertanian, namun juga membuka peluang strategis bagi BPPSDMP melalui pemanfaatan pendanaan dan program insentif pemerintah. Skema pendanaan iklim seperti *Green Climate Fund*, program *carbon farming*, dan dukungan anggaran adaptasi pemerintah dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelatihan dan pendampingan petani dalam menerapkan praktik pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*).

BPPSDMP dapat mengembangkan modul pelatihan yang mencakup penggunaan varietas tahan cekaman, pengelolaan air secara presisi, dan praktik budidaya rendah emisi. Dengan mengintegrasikan materi adaptasi iklim dalam program pelatihan, BPPSDMP tidak hanya meningkatkan kapasitas petani menghadapi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan produksi pangan secara berkelanjutan.

h. Kemitraan Internasional dan Program Donor

Indonesia memiliki rekam jejak positif sebagai pusat pelatihan pertanian bagi negara-negara Selatan–Selatan, yang menjadi modal penting dalam menjalin kemitraan internasional. Peluang ini dapat dimanfaatkan BPPSDMP untuk memperoleh hibah, *triangular cooperation*, atau proyek kolaborasi dengan lembaga internasional seperti JICA, FAO, dan IsDB.

Kemitraan ini dapat membawa masuk teknologi terkini, kurikulum berstandar global, dan sumber pendanaan yang mendukung pelaksanaan program strategis. Melalui jejaring global, BPPSDMP juga dapat meningkatkan reputasi internasional sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dan pengiriman tenaga ahli ke berbagai negara mitra.

i. Penguatan Skema Pembiayaan dan Insentif Fiskal

Kebijakan pemerintah yang memperluas akses pembiayaan sektor pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir LPDB, dan rencana alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik penyuluhan memberikan peluang signifikan bagi BPPSDMP untuk menjalin kemitraan pembiayaan pelatihan dan pendampingan. Dukungan ini penting untuk memastikan kesinambungan program strategis yang bersifat multi-tahun.

BPPSDMP dapat memanfaatkan kebijakan insentif fiskal untuk mendukung penyediaan sarana pelatihan, pengembangan materi berbasis teknologi, dan pendampingan kelembagaan petani. Pendekatan ini memungkinkan program tetap berjalan meskipun terjadi tekanan fiskal, sekaligus memperluas cakupan sasaran hingga ke daerah dengan keterbatasan anggaran daerah.

j. Integrasi Standar Kompetensi dan Sertifikasi Profesi

Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pertanian, sertifikasi penyuluh, serta rencana sertifikasi profesi petani oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan peluang besar untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kerja sektor pertanian. Sertifikasi ini dapat meningkatkan nilai upah, memperkuat daya saing tenaga kerja, dan mempermudah mobilitas di pasar domestik maupun ASEAN.

BPPSDMP dapat mengambil peran sebagai lembaga pelatihan terakreditasi yang mempersiapkan peserta hingga lolos uji sertifikasi. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak hanya memiliki keterampilan praktis, tetapi juga pengakuan resmi yang meningkatkan kredibilitas di mata industri dan pasar kerja.

k. Inklusi *Gender* dan Kelompok Rentan

Penguatan kebijakan pengarusutamaan gender, akses pembiayaan untuk wanita tani, serta program pemberdayaan penyandang disabilitas membuka peluang bagi BPPSDMP untuk memperluas basis sasaran program pelatihan. Pendekatan inklusif ini sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesetaraan sebagai salah satu pilar utama.

BPPSDMP dapat merancang pelatihan dengan metode, jadwal, dan pendekatan sosial budaya yang ramah bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Dengan demikian, dampak sosial program menjadi lebih luas, tidak hanya meningkatkan keterampilan tetapi juga memperkuat peran kelompok rentan dalam pembangunan pertanian.

l. Kolaborasi Lintas Kementerian dan Platform Data Terpadu

Inisiatif Satu Data Pertanian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian bersama Bappenas, Kemendagri, dan Kominfo membuka peluang besar untuk integrasi data SDM pertanian, lahan, dan kelembagaan secara nasional. Integrasi ini akan memudahkan perencanaan, penargetan program, serta evaluasi berbasis bukti yang akurat.

BPPSDMP dapat memanfaatkan platform data terpadu ini untuk memperbaiki pemetaan kebutuhan pelatihan, menghindari tumpang tindih program, dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Dengan akses ke data yang lebih valid dan terintegrasi, intervensi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata di lapangan.

4. Tantangan (*Threat*)

a. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Geopolitik

Ketidakpastian ekonomi global yang ditandai dengan fluktuasi harga komoditas pertanian, volatilitas pasar internasional, serta konflik geopolitik, berpotensi memengaruhi kestabilan permintaan dan harga hasil pertanian. Perubahan mendadak dalam kebijakan perdagangan internasional atau hambatan logistik dapat mengganggu arus ekspor dan mengurangi daya saing produk pertanian nasional di pasar global. Kondisi ini berdampak langsung pada keberlanjutan pendapatan petani dan efektivitas program peningkatan kapasitas yang dijalankan BPPSDMP.

Selain itu, ketergantungan pada impor input pertanian strategis seperti pupuk, benih tertentu, dan alat mesin pertanian menambah kerentanan terhadap guncangan eksternal. Kenaikan harga atau gangguan pasokan akibat kebijakan proteksionis negara pemasok dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program yang membutuhkan dukungan sarana produksi, sehingga risiko ini harus diantisipasi melalui strategi diversifikasi sumber pasok dan peningkatan produksi domestik.

b. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi

Perubahan iklim menimbulkan tantangan serius bagi sektor pertanian melalui perubahan pola curah hujan, meningkatnya suhu rata-rata, dan intensitas kejadian ekstrem seperti banjir, kekeringan, serta angin kencang. Kondisi ini berpotensi mengganggu kalender tanam, menurunkan produktivitas, dan merusak infrastruktur pendukung pelatihan serta demonstration farm (demfarm). Dampak tersebut akan mempersulit pencapaian target kinerja, terutama jika program tidak dilengkapi dengan mekanisme adaptasi yang responsif terhadap kondisi iklim lokal.

Selain itu, bencana hidrometeorologi dapat menimbulkan kerugian berlapis, mulai dari kerusakan lahan dan sarana pelatihan hingga terhentinya kegiatan pendampingan di wilayah terdampak. Tanpa integrasi strategi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan program, keberlanjutan kegiatan dan kualitas output pelatihan berisiko menurun secara signifikan.

c. Penurunan Jumlah dan Usia Petani

Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, urbanisasi, dan minimnya insentif bagi generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian telah menyebabkan berkurangnya jumlah petani aktif. Penurunan ini mengancam ketersediaan tenaga kerja pertanian yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kecenderungan tersebut juga diperburuk oleh rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha tani sebagai pilihan karier yang berkelanjutan.

Mayoritas petani yang ada saat ini berada pada kelompok usia di atas 50 tahun, sehingga keterbatasan fisik dan adaptasi terhadap teknologi baru menjadi kendala. Jika tren ini tidak diatasi melalui program regenerasi yang efektif, maka akan timbul risiko kekurangan

tenaga kerja produktif yang mampu mengadopsi inovasi, mengelola usaha tani secara modern, dan menjamin kesinambungan produksi pertanian dalam jangka panjang.

d. Ketimpangan Akses Digital dan Infrastruktur Penyuluhan

Keterbatasan akses internet, pasokan listrik, dan sarana penyuluhan di wilayah 3T menjadi hambatan signifikan dalam pemerataan transformasi pertanian berbasis teknologi. Kondisi ini menghambat penerapan metode penyuluhan digital, pembelajaran daring, dan pemanfaatan aplikasi pertanian pintar yang dapat meningkatkan efisiensi usaha tani. Akibatnya, petani di wilayah tersebut berisiko tertinggal dalam pemanfaatan inovasi teknologi yang mendukung produktivitas dan daya saing.

Selain itu, ketimpangan infrastruktur ini memperbesar kesenjangan kualitas layanan penyuluhan antarwilayah. Program digitalisasi pertanian yang digagas di tingkat pusat sulit mencapai efektivitas maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, sehingga perlu adanya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan fasilitas dasar di wilayah dengan keterbatasan akses.

e. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor dan Tingkat Pemerintahan

Perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan penyuluh serta pelatihan seringkali menimbulkan duplikasi, kesenjangan, atau tumpang tindih program. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian sasaran strategis BPPSDMP karena alokasi sumber daya menjadi tidak optimal. Lemahnya koordinasi lintas sektor juga mengurangi potensi sinergi program yang dapat meningkatkan efektivitas intervensi.

Minimnya integrasi data antarinstansi memperburuk situasi, mengingat keberhasilan program berbasis bukti memerlukan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tanpa harmonisasi kebijakan dan mekanisme kerja lintas sektor, pelaksanaan program berisiko berjalan parsial dan kurang memberikan dampak optimal bagi peningkatan kapasitas SDM pertanian.

f. Terbatasnya Alokasi Anggaran dan Ketergantungan Dana APBN

Keterbatasan ruang fiskal yang tersedia bagi sektor pertanian membatasi kemampuan BPPSDMP dalam merancang dan melaksanakan program secara luas dan berkelanjutan. Ketergantungan tinggi pada sumber pendanaan APBN menjadikan program rentan terhadap perubahan prioritas kebijakan nasional maupun pemangkasan anggaran akibat dinamika ekonomi. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program strategis yang memerlukan kesinambungan pembiayaan.

Tanpa diversifikasi sumber pendanaan, seperti pemanfaatan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga donor internasional, atau skema pembiayaan alternatif, fleksibilitas BPPSDMP dalam menyesuaikan program terhadap perubahan situasi akan tetap terbatas. Hal ini dapat menurunkan kemampuan organisasi dalam merespons tantangan eksternal secara cepat dan efektif.

C. Capaian Kinerja BPPSDMP 2020 – 2024

1. Penyuluhan Pertanian
 - a. Kelembagaan Petani

Selama periode 2020–2024, telah terjadi peningkatan signifikan dalam pembentukan kelembagaan petani. Jumlah kelompok tani meningkat dari 646.293 pada tahun 2020 menjadi 755.542 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah anggota kelompok tani dari 15,6 juta menjadi 24 juta orang. Capaian ini menunjukkan adanya penguatan peran kelembagaan sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Di samping itu, jumlah kelembagaan ekonomi petani juga mengalami pertumbuhan positif, dari 11.817 pada tahun 2020 menjadi 14.301 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai program pembinaan dan fasilitasi yang mendorong kelompok tani untuk bertransformasi menjadi kelembagaan usaha tani yang mandiri dan berbasis agribisnis.

Namun demikian, meskipun secara kuantitatif mengalami peningkatan, sebagian besar kelompok tani masih berada pada kelas pemula, yaitu sebesar 61% dari total poktan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi pembinaan berkelanjutan dan berjenjang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani menuju kelompok madya dan utama.

Jumlah gapoktan relatif stagnan dalam lima tahun terakhir, yaitu berkisar pada angka 64 ribuan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mendorong konsolidasi kelembagaan di tingkat desa agar mampu mengelola usaha kolektif, memperkuat fungsi pelayanan bersama, serta membuka akses pasar dan pembiayaan secara lebih efektif.

Capaian tersebut juga memperlihatkan perbedaan distribusi wilayah yang signifikan. Provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan menjadi kontributor terbesar dalam jumlah poktan dan anggotanya. Ke depan, wilayah-wilayah ini berpotensi dikembangkan sebagai lokus penguatan kelembagaan berbasis kawasan dan digitalisasi pertanian.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa program penguatan kelembagaan petani telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan kualitas dan kesinambungan pembinaan agar mampu menjawab tantangan modernisasi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

- b. Kelembagaan penyuluhan

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Berdasarkan data dari Pusat Penyuluhan Pertanian Semester II Tahun 2024 yang telah diolah oleh Sekretariat BPPSDMP, jumlah BPP meningkat dari 5.741 unit pada tahun 2020 menjadi 5.829 unit pada tahun 2023 dan tetap stabil di angka tersebut hingga tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya komitmen berkelanjutan dalam memperkuat kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian nasional.

Peningkatan jumlah BPP selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai hasil dari berbagai intervensi dan dukungan program yang dilakukan oleh BPPSDMP, termasuk

revitalisasi kelembagaan, penguatan fungsi kelembagaan, serta integrasi perencanaan pusat dan daerah. Periode 2021 mencatat kenaikan signifikan sebanyak 54 unit dibanding tahun sebelumnya, diikuti oleh peningkatan lebih moderat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai titik puncak pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, struktur kelembagaan penyuluhan di Indonesia terdiri dari 38 Dinas tingkat provinsi yang membawahi 514 dinas/instansi penyuluhan di tingkat kabupaten dan 5.829 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Sebagai bagian dari sistem penyuluhan nasional, BPP menjadi simpul koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian yang secara langsung bersentuhan dengan petani, kelompok tani, dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Distribusi jumlah BPP di tingkat provinsi menunjukkan konsentrasi tinggi pada provinsi-provinsi dengan wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi dengan jumlah BPP tertinggi, masing-masing sebanyak 589, 553, dan 491 unit. Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya memiliki jumlah BPP yang relatif rendah, masing-masing hanya 27, 23, dan 23 unit. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan strategi pembangunan kelembagaan di masa mendatang.

Berdasarkan data kelembagaan penyuluhan dari Pusat Penyuluhan Pertanian, jumlah total kecamatan di Indonesia yang seharusnya memiliki kelembagaan penyuluhan tercatat sebanyak 6.842 kecamatan. Dengan demikian, masih terdapat 1.013 kecamatan (sekitar 15%) yang belum memiliki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan kelembagaan penyuluhan terus mengalami peningkatan, masih diperlukan strategi perluasan dan pemerataan pembentukan BPP di wilayah yang belum terjangkau.

Ketimpangan ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang cenderung memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Penguatan kelembagaan di tingkat kecamatan melalui pendirian BPP baru atau revitalisasi lembaga yang ada menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan penyuluhan pertanian menjangkau seluruh petani secara merata.

Secara keseluruhan, pencapaian ini menunjukkan bahwa BPPSDMP bersama pemerintah daerah telah berhasil menjaga kesinambungan dan peningkatan infrastruktur kelembagaan penyuluhan sebagai prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas SDM pertanian. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa seluruh BPP yang ada dapat berfungsi secara optimal, memiliki tenaga penyuluh yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung tugas penyuluhan secara efektif dan efisien.

c. Ketenagaan penyuluhan

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah total penyuluh pertanian mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penyuluh pertanian tercatat sebanyak 67.135 orang, meningkat menjadi 68.521 pada tahun 2021. Namun, sejak 2022 hingga 2024, jumlah ini terus menurun, dengan angka pada tahun 2024 tercatat sebesar 65.274 orang. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah penyuluh PNS dan THL-TBPP, dua segmen yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam sistem penyuluhan nasional.

Penyuluh PNS yang pada tahun 2020 berjumlah 25.810 orang mengalami penurunan signifikan menjadi 22.883 orang pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh tingginya angka pensiun yang tidak sebanding dengan rekrutmen baru. Sebagian penurunan tersebut ditopang oleh hadirnya penyuluh PPPK, yang mulai masuk sejak tahun 2021. Jumlah penyuluh PPPK terus meningkat dari 11.404 orang pada tahun 2021 menjadi 13.803 orang pada tahun 2024, menjadikan kategori ini sebagai kontributor utama peningkatan tenaga penyuluh di tengah tren penurunan jumlah penyuluh PNS.

Sementara itu, penyuluh THL-TBPP mengalami penurunan yang sangat tajam. Dari 11.788 orang pada tahun 2020, jumlahnya merosot menjadi hanya 1.129 orang pada tahun 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh program peralihan status menjadi ASN melalui skema PPPK serta kebijakan penghentian perekrutan THL baru.

Jumlah penyuluh swadaya tetap menjadi kelompok terbesar, meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 29.397 orang, mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebanyak 30.118 orang, lalu menurun dan stabil di angka 26.957 orang pada tahun 2023 dan 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap menunjukkan partisipasi aktif dalam sistem penyuluhan melalui skema penyuluh swadaya.

Penyuluh dari sektor swasta menunjukkan tren yang berbeda. Walaupun kelompok ini paling kecil jumlahnya, peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2023, naik dari hanya 155 orang pada tahun 2022 menjadi 502 orang dan tetap pada angka tersebut di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya keterlibatan lebih besar dari dunia usaha dalam mendukung kegiatan penyuluhan pertanian, seiring dengan berkembangnya kemitraan agribisnis dan dukungan dari sektor industri pertanian.

Perubahan komposisi dan jumlah penyuluh ini berdampak pada pengelolaan kelembagaan penyuluhan di daerah. Dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam merancang strategi regenerasi penyuluh, pemetaan kebutuhan SDM penyuluhan di tingkat kecamatan, serta perbaikan dalam sistem rekrutmen dan pembinaan penyuluh agar pelayanan penyuluhan tetap optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

d. Program Simurp

Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan inisiatif kerja sama yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani melalui pendekatan Climate Smart Agriculture (CSA), sekaligus mendukung modernisasi sistem irigasi di Indonesia. Proyek ini dilaksanakan di 13 provinsi dan 64 kabupaten/kota, mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lingkup pelaksanaan yang luas tersebut memperlihatkan komitmen SIMURP dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui intervensi pada kawasan pertanian strategis berbasis irigasi.

Selama periode 2019–2024, capaian SIMURP menunjukkan hasil yang signifikan. Indikator kinerja utama (Project Development Objective/PDO) yang ditetapkan oleh World Bank dan AIIB menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari 180 menjadi 200. Berdasarkan hasil pengukuran dengan data citra satelit SIMOTANDI Kementerian Pertanian, IP padi di lokasi SIMURP meningkat dari 198 pada tahun 2022, naik menjadi

207 pada 2023, dan mencapai 216 pada 2024. Dengan capaian tersebut, target PDO sebesar 200 telah berhasil dilampaui pada akhir periode proyek.

Selain PDO, capaian indikator antara (Intermediate Objectives/IOs) juga menunjukkan keberhasilan. Target jumlah rumah tangga petani yang memperoleh layanan irigasi lebih baik ditetapkan pada 300 petani untuk Komponen A dan 587 petani untuk Komponen B. Realisasi melebihi target pada Komponen A dengan capaian 515 petani, sedangkan pada Komponen B mencapai 380 petani, sehingga secara total kinerja indikator antara menunjukkan tren positif.

Capaian Calon Petani Calon Lahan (CPCL) juga melampaui target awal. Dari target 2.808 kelompok tani dengan 70.200 petani, realisasi mencapai 5.685 kelompok tani dan 164.000 petani yang tersebar di 117 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di sepuluh provinsi lokasi SIMURP. Selain itu, kegiatan CSA Scaling Up dilaksanakan di 48 lokasi pada 24 kabupaten, dengan setiap lokasi melibatkan lebih dari satu kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan penerima manfaat melampaui ekspektasi awal, baik dari sisi jumlah kelembagaan maupun anggota petani.

Penerapan teknologi Climate Smart Agriculture (CSA) terbukti memberikan dampak nyata pada peningkatan produktivitas. Di lokasi demplot, produktivitas padi tercatat lebih tinggi dibandingkan lahan non-CSA dengan selisih rata-rata 0,6–0,8 ton per hektar. Implementasi metode Scaling Up yang diterapkan pada hamparan luas 25–50 hektar bahkan menunjukkan peningkatan produktivitas rata-rata 1,24 ton per hektar gabah kering panen dibandingkan praktik konvensional. Dampak positif ini turut mendorong peningkatan jumlah rumah tangga petani penerima manfaat menjadi 854.000 RTP, melebihi target 791.000 RTP.

Selain itu, program CSA SIMURP juga berhasil memberikan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Hasil pengukuran emisi gas rumah kaca (GRK) di lokasi demplot menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 32 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 35 persen pada tahun 2023 dibandingkan dengan praktik budidaya konvensional. Dari sisi kelembagaan, penguatan kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) mendorong tumbuhnya usaha produktif yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga petani, sekaligus memperkuat keberlanjutan adopsi teknologi CSA di tingkat lapangan.

e. Program IPDMIP

Proyek IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project) dilaksanakan pada 74 Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di 16 provinsi dan 64 kabupaten di Indonesia. Di wilayah Sumatera, implementasi proyek mencakup Provinsi Sumatera Utara dengan lokasi di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Asahan; di Sumatera Selatan menjangkau Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Banyuasin; serta di Lampung mencakup Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur. Proyek ini berfokus pada penguatan kelembagaan petani pemakai air, peningkatan produktivitas, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Di Pulau Jawa, IPDMIP dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi antara lain di Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kendal; sedangkan di Jawa Timur meliputi Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, dan Ngawi. Implementasi di Jawa menekankan pada

peningkatan efisiensi tata kelola air irigasi dan penerapan praktik pertanian modern berbasis iklim.

Sementara itu di Kawasan Sulawesi, kegiatan berlangsung cukup luas. Di Sulawesi Selatan proyek berjalan di Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Wajo; di Sulawesi Tenggara berlokasi di Kabupaten Konawe, Kolaka, dan Bombana; sedangkan di Sulawesi Tengah difokuskan pada Kabupaten Sigi dan Donggala. Seluruh lokasi ini menjadi percontohan penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) melalui pemakaian varietas tahan cekaman, penggunaan pupuk berimbang, serta teknologi hemat air untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur, kelembagaan, serta kapasitas petani di 74 Daerah Irigasi pada 16 provinsi.

Dari sisi infrastruktur, IPDMIP telah melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi pada lebih dari 300.000 hektar lahan pertanian. Kegiatan ini meliputi perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier yang mengalami kerusakan maupun sedimentasi. Rehabilitasi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan efisiensi distribusi air, sehingga intensitas tanam yang semula rata-rata 1,2 kali per tahun meningkat menjadi lebih dari 2 kali tanam per tahun di sebagian besar lokasi sasaran.

Dalam aspek kelembagaan, proyek berhasil memperkuat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), serta Induk P3A (IP3A). Lebih dari 5.000 kelompok P3A telah memperoleh peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang berfokus pada manajemen kelembagaan, perencanaan operasional, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara partisipatif. Hasilnya, kelembagaan petani kini lebih efektif dalam mengatur jadwal tanam, mengelola distribusi air, dan menyelesaikan potensi konflik antaranggota.

Dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, IPDMIP memberikan pelatihan kepada puluhan ribu petani terkait praktik Climate Smart Agriculture (CSA). Materi pelatihan mencakup penggunaan varietas unggul tahan cekaman iklim, penerapan teknik budidaya hemat air seperti System of Rice Intensification (SRI), pemupukan berimbang, serta pemanfaatan teknologi digital sederhana untuk mendukung keputusan pengelolaan irigasi. Di beberapa lokasi, telah diinisiasi pula penggunaan teknologi drone untuk pemupukan dan pemantauan pertumbuhan tanaman, yang mencerminkan adopsi teknologi modern di tingkat petani.

Capaian ekonomi yang dihasilkan juga cukup signifikan. Pendapatan rumah tangga petani meningkat antara 15–25% dibandingkan kondisi sebelum adanya intervensi. Peningkatan ini ditopang oleh kenaikan produktivitas padi, sekaligus diversifikasi usaha tani menuju komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, proyek memfasilitasi terbentuknya kerja sama kemitraan antara kelompok tani dengan offtaker, sehingga pemasaran hasil produksi lebih terjamin dan harga jual lebih stabil.

Dari aspek keberlanjutan, IPDMIP mendorong integrasi kegiatan dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan tata kelola irigasi partisipatif yang telah diadopsi pemerintah daerah sebagai acuan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan demikian, manfaat proyek tetap berlanjut meskipun periode implementasi program telah selesai.

2. Pelatihan Pertanian

a. Purnawidya Pelatihan

Program purnawidya menjadi bagian akhir dari proses pelatihan yang menandai kelulusan peserta serta memberikan penguatan terhadap kesiapan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2.303 peserta telah mengikuti purnawidya, terdiri dari 1.174 laki-laki dan 1.129 perempuan, dengan distribusi yang relatif merata secara gender.

Dilihat dari tren lima tahun terakhir, jumlah peserta purnawidya mengalami peningkatan signifikan, dari 1.321 peserta pada tahun 2020 menjadi 2.303 peserta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Pertanian semakin diminati dan berhasil menjangkau lebih banyak SDM pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi dengan peserta terbanyak antara lain Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur, yang sekaligus menjadi indikator aktifnya lembaga pelatihan di daerah tersebut.

b. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi dilakukan untuk memastikan peserta pelatihan memiliki kemampuan kerja yang sesuai dengan standar nasional. Sepanjang tahun 2024, terdapat 1.148 peserta yang mengikuti uji sertifikasi, dan 1.117 orang (97,3%) dinyatakan kompeten. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang diberikan telah terstandarisasi dan berorientasi pada kebutuhan riil dunia kerja pertanian.

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, jumlah peserta sertifikasi meningkat dari 873 orang menjadi 1.148 orang, dengan tingkat kelulusan konsisten di atas 96%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan integrasi sistem pelatihan dengan skema sertifikasi yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dukungan dari asesor kompetensi yang telah tersebar di berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

c. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)

Kelembagaan P4S menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam menjalankan fungsi pelatihan berbasis masyarakat. Pada tahun 2024, terdapat 349 P4S aktif dengan total peserta pelatihan mencapai 11.982 orang, terdiri dari 7.127 laki-laki dan 4.855 perempuan. Materi pelatihan yang disampaikan mencakup budidaya tanaman, peternakan, pengolahan hasil, dan kewirausahaan pertanian.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai 5.601 peserta, maka jumlah peserta tahun 2024 mengalami lebih dari dua kali lipat peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa P4S telah menjadi simpul penting dalam penguatan kapasitas petani dan regenerasi pelaku utama di sektor pertanian. Peran P4S semakin vital dalam menjembatani program-program pemerintah dengan kebutuhan riil di tingkat desa.

d. Peningkatan Kompetensi Widyaiswara

Widyaiswara sebagai aktor utama dalam penyampaian materi pelatihan juga menjadi sasaran pengembangan kapasitas. Tahun 2024 mencatat 162 widyaiswara mengikuti program peningkatan kompetensi, dengan proporsi 86 laki-laki dan 76 perempuan. Peningkatan kapasitas difokuskan pada pembelajaran digital, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, dan penguatan metodologi pelatihan partisipatif.

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah widyaiswara yang terlibat dalam pengembangan kompetensi meningkat dari 103 orang menjadi 162 orang. Kenaikan ini selaras dengan kebijakan modernisasi sistem pelatihan pertanian dan tuntutan terhadap metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap teknologi.

e. Magang Luar Negeri

Magang luar negeri merupakan salah satu bentuk penguatan kapasitas SDM pertanian melalui pembelajaran langsung di negara maju. Pada tahun 2024, program ini mengirimkan 134 peserta ke Jepang, terdiri dari 109 laki-laki dan 25 perempuan, bekerja sama dengan Japan Agricultural Exchange Council (JAEC). Peserta mendapatkan pembelajaran tentang budidaya hortikultura, peternakan modern, manajemen usaha tani, dan konservasi lingkungan.

Tren selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah peserta dari 103 orang pada 2020 menjadi 134 orang pada 2024. Stabilitasnya jumlah peserta magang menunjukkan keberlangsungan kerja sama bilateral serta tingginya minat generasi muda untuk belajar langsung dari praktik pertanian di luar negeri. Alumni program ini diharapkan menjadi katalis dalam penyebaran teknologi tepat guna dan inovasi pertanian di daerah asal mereka.

f. Program READSI

Selama periode pelaksanaan tahun 2018 hingga 2025, Program READSI telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan ekonomi perdesaan di 6 provinsi dan 18 kabupaten sasaran. Pendekatan berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan pendampingan langsung melalui fasilitator desa dan penyuluh pertanian menjadi kunci keberhasilan program ini. READSI mampu menjangkau lebih dari 68.400 rumah tangga atau sekitar 342.000 penerima manfaat langsung, yang tersebar di 342 desa. Pelibatan lebih dari 3.800 kelompok tani sebagai ujung tombak intervensi membuktikan kekuatan pendekatan kolektif dan partisipatif yang diusung oleh program.

Pada aspek peningkatan kapasitas petani dan pengembangan mata pencaharian (Komponen 1), sebanyak 32.226 petani telah mengikuti pelatihan praktek teknologi produksi pertanian yang disesuaikan dengan komoditas unggulan lokal. Tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, pelatihan ini juga mendorong peningkatan adopsi teknologi. Data menunjukkan bahwa sekitar 72% rumah tangga petani penerima manfaat telah menerapkan inovasi dalam sistem usaha taninya. Peningkatan produktivitas dicapai secara merata, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan kakao menunjukkan kenaikan produktivitas antara 20% hingga 30% dibanding kondisi baseline.

READSI juga mencatat kemajuan dalam aspek inklusi keuangan. Sebanyak 17.372 petani memperoleh pelatihan literasi keuangan, yang mendorong mereka untuk mengakses layanan keuangan formal, seperti tabungan dan kredit. Hal ini mendukung pengelolaan usaha tani secara berkelanjutan dan profesional. Di sisi lain, peningkatan pemahaman keluarga tentang gizi juga menjadi prioritas. Sebanyak 11.343 rumah tangga mendapatkan edukasi dan dukungan dalam perbaikan konsumsi pangan bergizi seimbang, yang turut memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Dalam aspek kelembagaan, program berhasil membina 2.922 kelompok tani yang telah menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan 2.411 kelompok di antaranya membentuk unit usaha bersama. Transformasi kelembagaan ini penting untuk mendorong kemandirian ekonomi dan posisi tawar petani di pasar.

Capaian lainnya terlihat pada penguatan sistem layanan penyuluhan dan dukungan agribisnis (Komponen 2). Sebanyak 1.172 penyuluh pertanian telah mengikuti pelatihan penyegaran yang memperkuat perannya dalam mendampingi petani. Selain itu, terdapat 421 petani kakao yang dibekali keterampilan teknis dan manajerial untuk memperkuat rantai nilai komoditas tersebut. Dukungan terhadap penyediaan input juga signifikan, dengan 25.469 petani tercatat mengakses sarana produksi dan alsintan melalui skema yang difasilitasi program.

Program juga berhasil mendorong partisipasi perempuan dan petani muda dalam kegiatan pembangunan pertanian. Proporsi partisipasi perempuan mencapai sekitar 50% dari total penerima manfaat, yang tidak hanya aktif sebagai peserta pelatihan, tetapi juga mulai mengambil peran dalam kepemimpinan kelompok tani dan pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga.

Secara keseluruhan, Program READSI selama kurun waktu 2018–2025 berhasil mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan pertanian—produktivitas, literasi keuangan, gizi keluarga, dan penguatan kelembagaan—secara simultan dan berkelanjutan. Capaian ini tidak hanya memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup petani, tetapi juga memberikan model pemberdayaan yang dapat direplikasi dan diadopsi oleh program pembangunan lainnya.

3. Pendidikan Pertanian

a. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)

1) Mahasiswa Aktif

Selama periode 2020 hingga 2024, Polbangtan mencatat pertumbuhan jumlah mahasiswa aktif yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah mahasiswa aktif tercatat sebanyak 4.602 orang, yang kemudian meningkat menjadi 4.786 orang pada 2021, 5.022 orang pada 2022, 5.358 orang pada 2023, dan mencapai 5.498 orang pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Polbangtan semakin mampu menjangkau generasi muda di berbagai wilayah untuk mengakses pendidikan tinggi vokasional pertanian.

Peningkatan jumlah mahasiswa aktif di seluruh satuan pendidikan Polbangtan merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya tarik pendidikan vokasi. Hal ini ditunjang oleh pelaksanaan seleksi yang merata secara nasional, penerapan kurikulum berbasis praktik dan kewirausahaan, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Penerapan Teaching Factory dan model pembelajaran berbasis proyek juga turut berkontribusi dalam menjadikan Polbangtan sebagai institusi pendidikan yang relevan dengan dinamika pembangunan pertanian modern. Dari sisi demografi, mahasiswa yang masuk berasal dari berbagai latar belakang daerah, dengan proporsi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta didominasi oleh kelompok usia produktif 17–25 tahun.

2) Alumni Mahasiswa

Jumlah lulusan Polbangtan dalam lima tahun terakhir mencerminkan tren kenaikan yang stabil. Pada tahun 2020, Polbangtan meluluskan 1.308 mahasiswa, kemudian meningkat menjadi 1.390 lulusan pada 2021, 1.491 lulusan pada 2022, 1.589 lulusan pada 2023, dan mencapai 1.624 lulusan pada tahun 2024. Lulusan ini tersebar di berbagai subsektor pertanian, baik sebagai tenaga profesional di instansi pemerintah, swasta, maupun sebagai wirausahawan muda pertanian.

Sebagian besar lulusan Polbangtan berhasil terserap dalam lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Berdasarkan data tracer study, proporsi alumni yang bekerja dalam waktu enam bulan setelah lulus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengikuti program pelatihan lanjutan di dalam maupun luar negeri. Polbangtan juga terus mendorong alumni untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan pertanian melalui program pembinaan alumni dan jaringan kerja sama dengan stakeholder pertanian, termasuk dalam mendukung program petani milenial dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.

3) Dosen

Jumlah dosen yang aktif mengajar di lingkungan Polbangtan mengalami peningkatan dari 465 orang pada tahun 2020 menjadi 548 orang pada 2024. Peningkatan ini mencakup dosen tetap, dosen tidak tetap, serta dosen praktisi dari dunia industri dan lembaga mitra. Dari sisi kualifikasi, sekitar 61% dosen telah memiliki gelar magister (S2), dan 39% telah menempuh pendidikan doktoral (S3).

Distribusi dosen mencerminkan komitmen dalam memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa yang ideal serta menjaga mutu proses pembelajaran. Selain penguatan jumlah, kualitas dosen juga ditingkatkan melalui program pengembangan kompetensi, pelatihan pedagogi vokasional, serta fasilitasi studi lanjut. Polbangtan juga aktif menjalin kolaborasi tridharma perguruan tinggi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan lokal. Hal ini mendukung pengembangan kurikulum yang adaptif, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta selaras dengan arah pembangunan pertanian nasional.

4) Mahasiswa Aktif Kerjasama Luar Negeri

Polbangtan secara bertahap memperluas jangkauan program internasionalisasi dengan menjalin kerja sama luar negeri di bidang pendidikan vokasi. Hingga tahun 2024, tercatat terdapat 113 mahasiswa aktif yang mengikuti program kerja sama internasional, baik dalam bentuk double degree, pertukaran pelajar, program beasiswa luar negeri, maupun kegiatan short course bersama institusi mitra dari Asia Tenggara dan Timur. Salah satu bentuk nyata program ini adalah kerja sama dengan Timor Leste yang mengirimkan mahasiswa untuk belajar di PEPI Serpong sejak 2023.

Partisipasi mahasiswa dalam program internasional menjadi bagian dari strategi Polbangtan dalam menyiapkan lulusan yang berdaya saing global. Program ini juga mencerminkan kemampuan Polbangtan dalam memenuhi standar mutu internasional serta kesiapan institusi dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan berbasis kolaborasi. Mahasiswa peserta program ini difasilitasi tempat tinggal di asrama dan mendapatkan pembinaan akademik tambahan. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan memperkuat posisi Polbangtan sebagai Center of Excellence dalam pendidikan vokasi pertanian di kawasan regional.

5) Akreditasi

Capaian akreditasi merupakan cerminan kualitas dan tata kelola lembaga pendidikan yang memenuhi standar nasional. Hingga akhir 2024, seluruh Polbangtan telah memperoleh status akreditasi institusi, dan seluruh program studi dinyatakan terakreditasi oleh LAM dan BAN-PT. Sebagian besar program studi telah memperoleh peringkat “Baik Sekali” dan “Unggul”, menunjukkan adanya peningkatan mutu secara konsisten dalam hal kurikulum, SDM, sarana prasarana, serta capaian lulusan.

Akreditasi menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu eksternal yang mendorong Polbangtan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Proses reakreditasi secara berkala juga menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi vokasi. Upaya ini diiringi dengan penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara sistematis oleh Unit Penjaminan Mutu di setiap kampus. Akreditasi yang baik tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik dan daya saing lulusan, tetapi juga membuka peluang kemitraan internasional dan akses ke program hibah pendidikan nasional.

b. SMK Pembangunan Pertanian Negeri (SMK-PP Negeri)

1) Siswa Aktif

Jumlah siswa aktif di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri (SMK-PP Negeri) mengalami pertumbuhan konsisten sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.574 siswa aktif, kemudian meningkat menjadi 2.783 siswa pada 2021, 2.964 siswa pada 2022, 3.104 siswa pada 2023, dan mencapai 3.144 siswa pada 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan daya tarik pendidikan menengah vokasi pertanian, serta keberhasilan strategi rekrutmen yang memperluas akses pendidikan ke wilayah-wilayah non-perkotaan.

Jumlah siswa yang terus meningkat mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran SMK-PP Negeri dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keahlian terapan. Para siswa dididik dalam berbagai kompetensi keahlian seperti Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Agribisnis Perkebunan, Peternakan, Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, hingga Perawatan Kesehatan Hewan. Kurikulum yang digunakan berbasis Kurikulum 2013 dengan pendekatan teaching factory dan proyek nyata berbasis potensi lokal, serta dukungan praktik kerja lapangan. Secara demografi, mayoritas siswa berasal dari pedesaan dan memiliki latar belakang keluarga petani, menjadikan SMK-PP sebagai alat penting dalam regenerasi pelaku utama sektor pertanian.

2) Alumni SMK-PP Negeri

Meskipun data alumni per tahun tidak ditemukan secara lengkap, pada tahun 2024 tercatat bahwa jumlah alumni lulusan SMK-PP Negeri mencapai 996 orang. Tren ini diperkirakan mengalami peningkatan sejak 2020, yang ketika itu jumlahnya berada di kisaran 879 lulusan. Alumni SMK-PP banyak terserap di sektor pertanian rakyat maupun perusahaan perkebunan dan peternakan, serta sebagian lainnya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi seperti Polbangtan.

Berdasarkan hasil penelusuran alumni (tracer study), sebagian besar lulusan SMK-PP Negeri mampu terserap dalam dunia kerja dalam waktu enam bulan setelah kelulusan. Hal ini menjadi indikator efektivitas kurikulum berbasis kompetensi dan pendekatan teaching factory. Tidak sedikit pula alumni yang memanfaatkan

keterampilan kewirausahaan yang diperoleh selama masa pendidikan untuk membuka usaha tani mandiri, termasuk dalam skema program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP). Lulusan SMK-PP Negeri juga menjadi salah satu target utama dalam program Petani Milenial, mengingat karakter mereka yang adaptif terhadap teknologi serta memiliki pengalaman teknis langsung.

3) Guru

Jumlah guru SMK-PP Negeri juga mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan siswa. Tercatat pada tahun 2024 terdapat 275 guru, naik dari sekitar 242 guru pada tahun 2020. Komposisi ini terdiri dari guru PNS, honorer, dan tenaga pengajar praktisi, yang tersebar di SMK-PP Negeri Sembawa, Banjarbaru, dan Kupang.

Ketersediaan guru yang memadai sangat penting dalam menjamin mutu pendidikan. Mayoritas guru memiliki latar belakang pendidikan pertanian dan pelatihan pedagogik vokasional, serta secara berkala mendapatkan pembinaan kompetensi teknis dan metodologis. Sejumlah guru juga telah terlibat dalam kerja sama dengan dunia industri, lembaga riset, serta program inkubasi bisnis yang terintegrasi dengan kegiatan siswa. Peningkatan jumlah dan kualitas guru ini turut memperkuat posisi SMK-PP sebagai penyedia tenaga kerja terampil di sektor pertanian nasional.

4) Akreditasi

Capaian akreditasi SMK-PP Negeri hingga tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif. Seluruh satuan pendidikan SMK-PP telah memperoleh status akreditasi institusi, dengan mayoritas program keahlian terakreditasi minimal “Baik” dan sebagian telah mencapai “Baik Sekali”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi standar nasional dalam aspek kurikulum, manajemen, sarana prasarana, serta kinerja lulusan.

Akreditasi menjadi bukti komitmen SMK-PP Negeri dalam menjaga mutu pendidikan, serta menjadi syarat penting untuk memperoleh dukungan program pemerintah dan kemitraan dunia usaha. Proses peningkatan peringkat akreditasi secara berkelanjutan terus didorong melalui evaluasi internal dan eksternal, pelatihan manajemen sekolah, serta pelibatan stakeholders dalam perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan. Dengan akreditasi yang memadai, SMK-PP Negeri semakin siap menjadi institusi pendidikan vokasi menengah pertanian yang relevan dan unggul.

c. Tugas Belajar

1) Program Magister (S2)

Selama periode 2020–2024, program Tugas Belajar jenjang Magister menunjukkan konsistensi dalam memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kapasitas akademik dan profesional mereka. Jumlah peserta tugas belajar S2 tercatat sekitar 33 orang pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 45 orang pada 2021, 47 orang pada 2022, 45 orang pada 2023, dan 47 orang pada 2024, sehingga total peserta selama lima tahun mencapai 217 orang. Peningkatan ini mencerminkan dukungan kelembagaan terhadap pengembangan SDM pertanian yang berorientasi pada kualitas dan kompetensi yang relevan dengan tantangan pembangunan sektor pertanian modern.

Program ini mencakup berbagai disiplin ilmu yang mendukung sektor pertanian, mulai dari manajemen agribisnis, teknologi pertanian, penyuluhan, hingga kebijakan publik.

Para peserta diarahkan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki reputasi baik di bidangnya. Selain pembelajaran akademis, peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terapan yang hasilnya dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program Kementerian Pertanian. Dukungan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan S2 yang mampu berperan sebagai pengambil keputusan, perencana, dan inovator di unit kerja masing-masing.

2) Program Doktor (S3)

Program Tugas Belajar jenjang Doktor juga menjadi prioritas dalam membangun kapasitas SDM pertanian yang memiliki keahlian strategis dan mendalam di bidangnya. Sepanjang 2020–2024, jumlah peserta S3 tercatat sebanyak 9 orang pada 2020, 13 orang pada 2021, 15 orang pada 2022, 12 orang pada 2023, dan 10 orang pada 2024, dengan total 59 orang dalam lima tahun. Fokus utama dari program ini adalah melahirkan pakar-pakar pertanian yang mampu menghasilkan kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang berdampak pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.

Peserta tugas belajar S3 diarahkan untuk menempuh studi di bidang-bidang strategis seperti bioteknologi pertanian, pemuliaan tanaman, manajemen sumber daya alam, serta kebijakan pangan. Penelitian yang dilakukan oleh peserta tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan praktis di lapangan, seperti peningkatan efisiensi produksi, mitigasi perubahan iklim, dan pengembangan pasar pertanian. Melalui program ini, diharapkan terbentuk jejaring akademik dan profesional yang mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah pertanian global.

d. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP)

Program PWMP merupakan salah satu inisiatif strategis Kementerian Pertanian yang dirancang untuk mencetak generasi muda sebagai pelaku usaha agribisnis yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam kurun waktu 2020–2024, jumlah kelompok PWMP yang berhasil dibentuk mencapai 1.540 kelompok, meningkat signifikan dari 216 kelompok pada tahun 2020 menjadi 400 kelompok pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan efektivitas pendekatan pembinaan yang menggabungkan pelatihan teknis, manajemen usaha, pendampingan lapangan, dan fasilitasi akses permodalan.

Setiap kelompok PWMP biasanya terdiri dari lulusan atau mahasiswa tingkat akhir Polbangtan dan SMK-PP Negeri, yang dibekali dengan modal awal usaha, bimbingan teknis, serta pendampingan bisnis secara intensif selama periode inkubasi. Subsektor usaha yang dikembangkan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga pengolahan hasil pertanian. Program ini juga mendorong sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan pelaku industri untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dirintis oleh peserta PWMP. Keberhasilan program ini terlihat dari banyaknya alumni yang berhasil mengembangkan usahanya secara mandiri, memperluas lapangan kerja, dan berkontribusi pada peningkatan nilai tambah produk pertanian di wilayahnya.

e. Petani Milenial

Program Petani Milenial menjadi pilar penting dalam agenda regenerasi petani dan modernisasi pertanian nasional. Sepanjang 2020–2024, Kementerian Pertanian berhasil memfasilitasi terbentuknya 168.948 petani milenial di berbagai provinsi. Sasaran program ini adalah individu berusia 19–39 tahun yang memiliki minat tinggi di bidang pertanian dan bersedia mengadopsi teknologi pertanian modern, mengembangkan usaha tani, serta memanfaatkan platform digital untuk pemasaran dan manajemen usaha.

Implementasi program dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi, seperti pelatihan teknis berbasis komoditas unggulan, fasilitasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan lainnya, serta pendampingan usaha melalui jejaring mentor profesional. Selain itu, program ini terintegrasi dengan inisiatif lain seperti PWMP dan Teaching Factory, sehingga peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam mengelola usaha pertanian dari hulu hingga hilir. Hasilnya, banyak petani milenial yang tidak hanya berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi juga menjadi agen perubahan di komunitasnya, mendorong adopsi inovasi, dan memperluas pasar produk pertanian ke level nasional bahkan ekspor.

f. Program YESS

Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dengan dukungan pinjaman dan hibah dari lembaga keuangan internasional (lender). Sebagai Executing Agency, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bertanggung jawab penuh atas implementasi program, dengan dukungan lembaga pendidikan vokasi (Polbangtan dan SMK-PP) sebagai Project Provincial Implementation Unit (PPIU) di empat provinsi.

Program ini dilaksanakan sejak 17 Juni 2019 hingga 31 Desember 2025, dengan tanggal penyelesaian kegiatan pada 30 Juni 2025. Lokasi pelaksanaannya meliputi 19 kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Cianjur, Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Bogor), Jawa Timur (Malang, Pacitan, Pasuruan, Tulungagung, Banyuwangi), Kalimantan Selatan (Banjar, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan), dan Sulawesi Selatan (Bantaeng, Bone, Bulukumba, Maros, Gowa).

Secara umum, tujuan program adalah menumbuhkan petani dan wirausahawan muda serta meningkatkan jumlah pemuda yang bekerja di sektor pertanian. Upaya ini ditempuh melalui penguatan lembaga pendidikan vokasi dan inkubator bisnis, fasilitasi kewirausahaan, dukungan akses keuangan, pelatihan aparatur dan non-aparatur, program pemagangan, serta penciptaan lingkungan pendukung yang kondusif bagi transformasi pertanian pedesaan.

Selama kurun waktu 2019–2025, Program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) telah menunjukkan capaian yang melampaui target. Program ini berhasil menjangkau 315.357 penerima manfaat atau 143% dari target, dengan keterlibatan laki-laki dan perempuan yang seimbang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 198

ribu pemuda pedesaan mendapat manfaat nyata berupa pelatihan manajemen bisnis, literasi keuangan, hibah kompetitif, dan pemagangan.

Dampak nyata program terlihat dari kontribusi pada ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Hingga pertengahan 2025, sebanyak 11.436 pemuda lulusan pendidikan vokasi dan pemagangan telah bekerja atau berwirausaha di sektor pertanian, sementara 46 ribu wirausaha pedesaan melaporkan peningkatan keuntungan usahanya. Program ini juga mendorong penciptaan lebih dari 102 ribu lapangan kerja baru, jauh melampaui target awal, serta membuka akses keuangan dengan melibatkan 81 ribu pemuda pengguna produk tabungan dan 20 ribu pemuda pengguna layanan pembiayaan.

Selain itu, program memberikan hibah kompetitif senilai Rp117,73 miliar kepada hampir 4 ribu penerima manfaat dari berbagai skema, termasuk individu, klaster, santri tani, pekerja migran, serta kelompok adat dan disabilitas. Program YESS juga memastikan inklusi dengan melibatkan 941 penyandang disabilitas serta menjangkau sejumlah komunitas adat di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Dari sisi peningkatan kapasitas, program telah menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan, mulai dari motivasi bisnis, startup, hingga advance training dan smart farming. Total peserta pelatihan manajemen bisnis mencapai 142.997 orang, sedangkan pelatihan literasi keuangan diikuti oleh 94.492 pemuda baik melalui community base maupun platform LMS. Hal ini memperlihatkan bahwa YESS tidak hanya menumbuhkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kecakapan manajerial dan literasi finansial generasi muda pertanian.

Sebagai legacy, YESS menghasilkan 23 publikasi knowledge management, mencakup kisah sukses petani muda dari 19 kabupaten, praktik terbaik, serta buku A to Z Program YESS. Dokumentasi ini tidak hanya merekam keberhasilan, tetapi juga memberikan inspirasi dan panduan bagi pengembangan program serupa di masa depan. Dengan adanya publikasi ini, praktik baik yang telah terbukti di lapangan dapat direplikasi lebih luas, sekaligus memperkuat komitmen terhadap regenerasi petani.

Secara keseluruhan, capaian Program YESS membuktikan kontribusi nyata terhadap regenerasi petani, penciptaan ekosistem kewirausahaan muda di pedesaan, dan percepatan transformasi pertanian Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada perubahan cara pandang pemuda terhadap sektor pertanian sebagai bidang usaha yang menjanjikan, modern, dan berkelanjutan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian

1. Visi Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian merepresentasikan kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode 2029. Perumusan visi menggambarkan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Pertanian 2025–2029 adalah:

**“PERTANIAN MAJU BERKELANJUTAN SERTA BERMANFAAT BAGI RAKYAT INDONESIA
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS
2045”**

Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 dapat diartikan bahwa pembangunan sektor pertanian haruslah memberikan manfaat sebesar-besarnya. Manfaat diberikan dengan penyelenggaraan pertanian secara berkelanjutan. Visi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 memiliki 4 (empat) kata kunci, meliputi: pertanian, pertanian maju, pertanian berkelanjutan dan pertanian yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pertanian

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

b. Pertanian Maju

Pertanian yang maju bermakna bahwa Pertanian Indonesia yang akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

c. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga, dalam praktik Pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa Pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, terdapat beberapa manfaat yang diterima masyarakat sebagai berikut:

- 1) Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.

- 2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
- 3) Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
- 4) Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

2. Misi Kementerian Pertanian

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kementerian Pertanian. Misi merupakan upaya yang harus dilakukan Kementerian Pertanian 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi. Misi Kementerian Pertanian 2025 – 2029 meliputi:

a. Meningkatkan kesejahteraan petani.

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi Penyiapan Prasarana dan Sarana Pertanian, Budidaya Pertanian, Pasca Panen komoditas Pertanian, Pengolahan komoditas Pertanian, serta Pemasaran komoditas pertanian.

b. Mendorong kemandirian pangan asal pertanian.

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bermakna bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

c. Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia.

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- 2) Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- 3) Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT)

d. Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah monkeypox (Mpox), Rabies, Anthrax, dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisir dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

e. Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik.

Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

3. Tujuan Kementerian Pertanian

Berdasarkan kelima misi tersebut, dirumuskan Tujuan Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Tujuan merupakan penjabaran misi menjadi bentuk yang lebih detail sehingga dapat merepresentasikan bahwa misi telah terlaksana dengan baik. Berikut penjabaran tujuan Kementerian Pertanian 2025 – 2029.

- a. Meningkatnya volume usaha pertanian dan kapasitas SDM Pertanian yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan, yaitu pertumbuhan volume usaha pertanian dan pertumbuhan pelaku usaha pertanian yang naik kelas.
- b. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas yang diukur dengan 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu: indeks swasembada pangan prioritas, indeks penerapan sistem budi daya pertanian, dan indeks cadangan asal pertanian nasional.
- c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat yang diukur dengan indikator tujuan persentase pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energy, pertumbuhan volume ekspor komoditas pertanian, dan persentase peningkatan hilirisasi komoditas pertanian.
- d. Menurunnya kasus penularan penyakit hewan kepada manusia yang diukur dengan indikator tujuan persentase penurunan kasus penyakit hewan yang menular kepada manusia.
- e. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional yang diukur dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

B. Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP 2025 – 2029

1. Visi BPPSDMP

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) 2025–2029 disusun selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025–2029. Rumusan ini menjadi arah strategis yang menegaskan peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP adalah:

“SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan visi Badan PPSDMP 2025 – 2029 di atas, terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu SDM pertanian produktif, SDM pertanian maju, SDM pertanian mandiri dan SDM pertanian sejahtera. Keempat kata kunci tersebut menjelaskan *positioning* SDM pertanian sebagai aset untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional. SDM sebagai aset merupakan perubahan paradigma pengelolaan SDM pertanian yang tidak memandang manusia sebagai faktor produksi namun sebagai modal penting dalam pembangunan pertanian ke depan. Penjelasan dari masing-masing kata kunci dijabarkan lebih rinci sebagai berikut.

a. SDM Pertanian Produktif

Kata kunci pertama bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. SDM Pertanian Maju

Kata kunci kedua bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

c. SDM Pertanian Mandiri

Kata kunci ketiga bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha

d. SDM Pertanian Sejahtera

Kata kunci keempat bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya

2. MISI BADAN PPSDMP 2025 - 2029

Untuk mewujudkan Visi BPPSDMP 2025–2029, dirumuskan misi yang akan menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama lima tahun ke depan.

a. Misi 1: Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertarik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

b. Misi 2: Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma *human capital* dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani.

Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi dimana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan *output* yang lebih besar dengan *input* minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di sektor pertanian untuk secara mandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian

mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pertanian serta berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian.

- c. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029.

3. TUJUAN BADAN PPSDMP 2025 - 2029

Tujuan adalah penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Perumusan Tujuan Badan PPSDMP mengacu dan menerjemahkan misi kedalam bentuk yang lebih operasional sehingga perwujudan tujuan dapat diartikan sebagai misi yang terlaksana. Pelaksanaan misi yang baik dipastikan memengaruhi perwujudan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029. Berdasarkan hasil analisis, berikut Tujuan Badan PPSDMP 2025 – 2029.

- a. Tujuan 1: Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa yang capaiannya diukur dengan indikator tujuan 1 (IT.1) “Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa”
- b. Tujuan 2: Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani yang capaiannya diukur dengan indikator tujuan 2 (IT.2) “Pertumbuhan Aset SDM pemilik usaha tani yang naik kelas
- c. Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional yang capaiannya diukur dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut.
 - 1) Indikator tujuan 3 (IT.3): Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor
 - 2) Indikator tujuan 4 (IT.4): Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP
 - 3) Indikator tujuan 5 (IT.5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan PPSDMP

C. Sasaran Program

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Pendekatan perumusan sasaran program Badan PPSDMP mengikuti penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian 2025 – 2029.

Kontribusi Badan PPSDMP pada pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan menjadi sasaran program **“Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.”** Sasaran tersebut

merepresentasikan peningkatan skala pelaku usaha tani yang berkontribusi pada kesejahteraan petani. Skala usaha tani dapat diartikan sebagai kemampuan usaha tani dalam mengelola sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan maupun sumber daya lain yang berpengaruh pada besaran pendapatan usaha tani.

Peningkatan kelas dapat diartikan bahwa usaha tani menerima pendapatan yang lebih baik dan posisi bisnis yang lebih strategis sehingga dapat menjamin kesejahteraan petani. Peran SDM Pertanian sebagai pelaku usaha merupakan posisi strategis. SDM Pertanian sebagai aset merupakan modal utama dalam pencarian inovasi dan eksekusi bisnis. Hal tersebut dapat berjalan baik dengan SDM pertanian yang unggul dan memahami potensi serta tantangan dari lingkungan strategis penyelenggaraan usaha tani.

D. Pohon Kinerja BPPSDMP

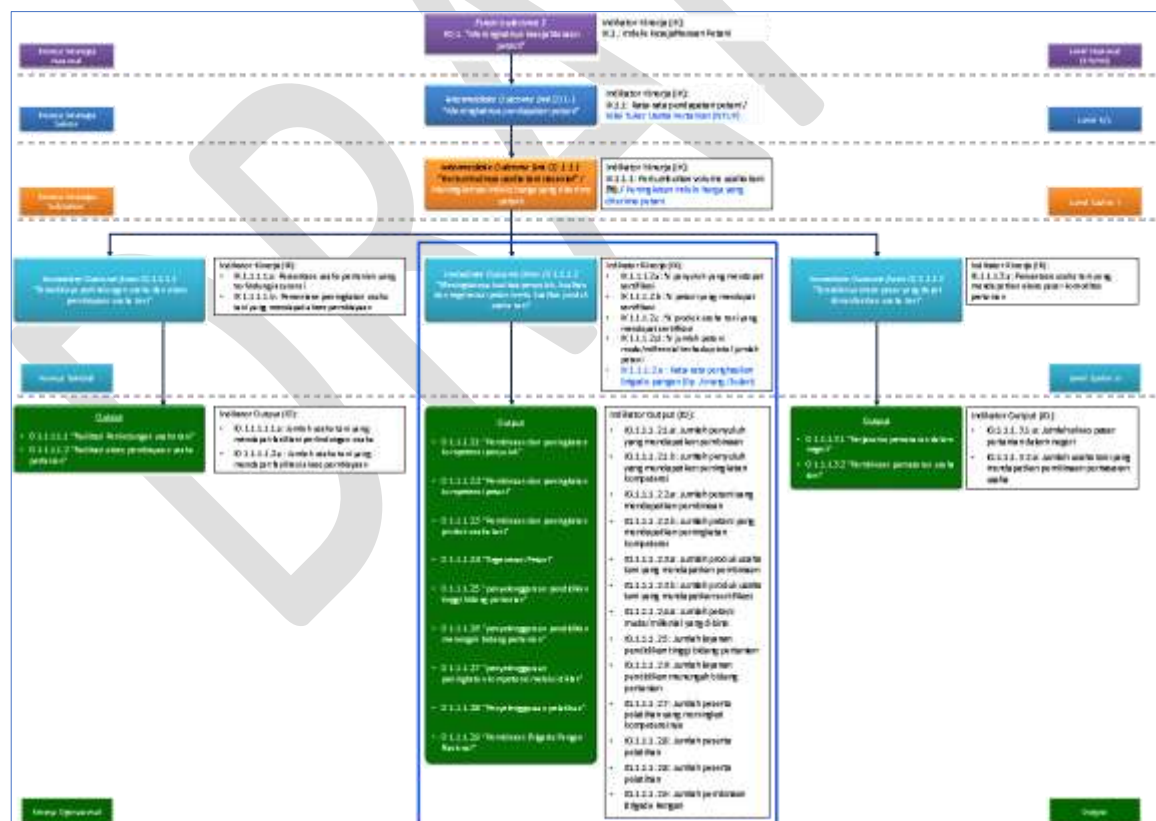
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Adanya pohon kinerja dapat membantu Badan PPSDMP untuk melihat alur logika dalam penerjemahan kinerja dari tingkat Kementerian Pertanian hingga Unit Kerja lingkup Badan PPSDMP. Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai *outcome*/kinerja yang diinginkan.

Pohon Kinerja Kementerian Pertanian dibangun atas dasar lima final outcome yang menjadi arah pencapaian pembangunan sektor pertanian. Outcome pertama berorientasi pada meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama yang menopang ketahanan pangan nasional. Outcome kedua menekankan terwujudnya kemandirian pangan yang bersumber dari hasil pertanian dalam negeri, sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara berkelanjutan tanpa bergantung pada impor. Outcome ketiga menggarisbawahi pentingnya kontribusi ekspor komoditas pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan devisa negara. Outcome keempat diarahkan pada terwujudnya kedaulatan dan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan potensi pertanian sebagai penyedia sumber energi terbarukan. Sementara itu, outcome kelima menegaskan peran pertanian dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas. *Final outcome* Kementerian Pertanian untuk Renstra periode 2025 – 2029 dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. Summary Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025 - 2029

Berdasarkan gambar di atas, Badan PPSDMP berperan dalam mewujudkan final outcome 1, yaitu "Meningkatnya kesejahteraan petani." Kesejahteraan petani dimaknai sebagai kondisi di mana petani mampu hidup layak serta memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Menurut BPS, kesejahteraan petani diukur secara multidimensi, meliputi aspek pendapatan dan penguasaan sumber daya, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, standar hidup layak, ketahanan pangan dan gizi, serta kemampuan mitigasi risiko.



Gambar 2. Kontribusi Badan PPSDMP Pada Pohon Kinerja Kementerian Pertanian 2025 - 2029

Berdasarkan gambar di atas, upaya mewujudkan kesejahteraan petani menuntut adanya peningkatan pendapatan petani. Pendapatan dalam hal ini dimaknai sebagai selisih antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks sektor pertanian, pendapatan juga direpresentasikan melalui Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). NTUP merupakan salah satu proksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan selisih antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan petani atau NTUP sangat bergantung pada pertumbuhan usaha tani. Dengan kata lain, semakin baik pertumbuhan usaha tani maka semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan petani. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, usaha tani mencakup kegiatan dalam bidang pertanian mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, hingga jasa penunjang. Dengan cakupan yang luas dari hulu hingga hilir, usaha tani memerlukan dukungan berupa perlindungan usaha dan akses pembiayaan, peningkatan kualitas SDM pertanian, regenerasi petani, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar yang terintegrasi dalam rantai pasok sektor pertanian.

Dalam konteks tersebut, Badan PPSDMP menjadi *leading sector* dalam peningkatan kualitas SDM pertanian sekaligus penyelenggaraan regenerasi petani. SDM pertanian yang dimaksud mencakup petani dan penyuluh. Petani merupakan pelaku utama usaha tani yang menjadi aset penting dalam menggerakkan sektor pertanian, sedangkan penyuluh pertanian berperan menyelenggarakan proses pembelajaran bagi petani agar mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, serta sumber daya lainnya. Melalui peran tersebut, penyuluh diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan petani sekaligus membangun kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Dengan demikian, penyuluh berfungsi sebagai penggerak peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani maupun usaha tani.

Peningkatan kualitas penyuluh dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi. Upaya yang sama juga berlaku bagi petani, di mana pembinaan diarahkan pada peningkatan kualitas produk usaha tani hingga mencapai sertifikasi produk, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai jual. Penguatan kapasitas SDM pertanian dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal dilaksanakan melalui Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian (SMK-PP), sedangkan pendidikan non-formal diberikan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat).

Regenerasi petani dilaksanakan dengan menyasar petani muda melalui penyuluhan serta pembentukan Brigade Pangan. Dengan orientasi pengelolaan yang berbasis *human capital management*, regenerasi petani dimaknai sebagai regenerasi aset pertanian. Kemampuan petani muda dalam mengadopsi dan menyerap teknologi modern akan menentukan masa depan pertanian nasional dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. Brigade Pangan sendiri merupakan inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan pelibatan generasi muda. Program ini meliputi pengelolaan optimal lahan rawa (OPLAH) serta pencetakan sawah rakyat (CSR) yang mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi.

Brigade Pangan memiliki dua tujuan utama, yaitu:

1. Mengelola usaha tani secara terstruktur dengan dukungan infrastruktur modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

2. Mewujudkan agribisnis pertanian modern yang melibatkan generasi muda sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif.

DRAFT

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 dirancang untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pembangunan pertanian nasional dalam jangka menengah yang semakin kompleks, dinamis, dan mendesak untuk segera ditangani. Perumusan arah kebijakan dan strategi ini berlandaskan pada Rencana Teknokratik RPJMN 2025–2029 serta sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang memperoleh mandat rakyat, khususnya dalam aspek ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.



Gambar 3. Rumah Strategi Kementerian Pertanian

Kerangka arah kebijakan dan strategi tersebut dituangkan dalam Rumah Strategi Kementerian Pertanian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Rumah strategi ini menggambarkan keterkaitan antara visi, tujuan antara, pilar, dan fondasi yang membentuk satu kesatuan sistem pembangunan pertanian berkelanjutan, yaitu:

1. Pertumbuhan volume usaha pertanian;
2. Kemandirian pangan asal pertanian;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan baku bioenergi;
4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
5. Terjaganya kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.

Kelima tujuan antara tersebut hanya dapat diwujudkan apabila delapan pilar utama pembangunan pertanian ditegakkan secara konsisten. Kedelapan pilar dimaksud adalah:

1. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan;
3. Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional untuk memperkuat rantai nilai;
4. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) sebagai basis Lumbung Pangan Nasional;
5. Perlindungan usaha dan peningkatan akses pembiayaan pertanian;
6. Pengawasan ketaatan terhadap tata kelola pertanian berkelanjutan;

7. Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani yang tangguh dan berdaya saing;
8. Penguatan sistem kesehatan hewan nasional.

Tegaknya pilar-pilar pembangunan pertanian memerlukan fondasi yang kuat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, ditetapkan lima fondasi utama sebagai landasan dalam pembangunan pertanian 2025–2029, yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pertanian nasional yang produktif;
2. Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian untuk mendukung pelayanan publik yang efektif;
3. Standardisasi dan sertifikasi produk serta praktik pertanian;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian modern dalam seluruh proses budidaya hingga pascapanen;
5. Tata kelola pertanian berkelanjutan yang mengacu pada *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Farming Practices*, dan praktik baik lainnya.

Kontribusi **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)** diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan antara pertama, yaitu *“Pertumbuhan Volume Usaha Pertanian.”* Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesejahteraan petani sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan volume usaha pertanian secara langsung berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan petani, sehingga menjadi salah satu tolok ukur penting dalam keberhasilan pembangunan pertanian.

Lebih jauh, peran BPPSDMP dalam menopang pilar pembangunan difokuskan pada Pilar 7, yaitu *“Regenerasi Petani dan Pengembangan Usaha Tani.”* Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya minat generasi muda untuk berprofesi sebagai petani. Fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap ketersediaan tenaga kerja pertanian di masa depan. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, kekurangan jumlah petani akan memberikan dampak masif terhadap ketersediaan pangan nasional, terlebih mengingat kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi global maupun nasional. Oleh karena itu, penyediaan modal manusia yang berkualitas menjadi prasyarat utama dalam memastikan keberlanjutan usaha pertanian.

Selain kuantitas, aspek kualitas usaha tani juga berperan penting. Kualitas usaha tani sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan adaptasi petani terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, penyuluh pertanian memegang peran strategis sebagai agen pembangunan yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, pendampingan, serta dorongan kepada petani untuk mengadopsi teknologi dan metode pertanian modern. Melalui peran tersebut, penyuluh pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas petani sehingga mampu berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas volume usaha pertaniannya.

Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029 menempatkan pembangunan SDM pertanian sebagai inti dari transformasi sektor pertanian. Peningkatan kapasitas, regenerasi, serta penguatan kelembagaan petani merupakan faktor penentu dalam mewujudkan pertanian maju dan berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025 – 2029

Dalam kerangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025–2029, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, kelembagaan, serta tata kelola birokrasi yang profesional. Arah kebijakan dan strategi tersebut diformulasikan untuk menjawab tantangan pembangunan pertanian yang semakin kompleks, sekaligus memastikan keberlanjutan ketersediaan tenaga kerja pertanian yang berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

Arah kebijakan BPPSDMP ditetapkan pada dua pokok utama. Pertama, **peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia**. Kebijakan ini dioperasionalkan melalui strategi: (1) regenerasi petani dan pengembangan usaha tani berbasis kompetensi melalui penyuluhan serta penguatan modal manusia (*human capital*) pertanian; dan (2) pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di bidang pertanian, disertai peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional agar lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, **penguatan tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional**. Kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi implementasi reformasi birokrasi BPPSDMP untuk mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam setiap aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Arah kebijakan dan strategi tersebut menegaskan bahwa pembangunan SDM pertanian 2025–2029 tidak hanya diarahkan pada peningkatan kuantitas tenaga kerja pertanian, tetapi juga pada penguatan kualitas melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, serta perkembangan teknologi pertanian modern. Dalam kerangka ini, penyuluh pertanian diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan, sementara birokrasi yang bersih dan profesional menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif di bidang penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian.

BPPSDMP pada periode 2025–2029 berperan strategis sebagai penggerak utama dalam regenerasi petani, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dan penguatan tata kelola kelembagaan yang berintegritas. Peran tersebut diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional, khususnya peningkatan volume usaha pertanian dan terwujudnya kesejahteraan petani Indonesia.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan Badan PPSDMP untuk memfasilitasi dan mendorong eksekusi strategi untuk mewujudkan visi yang telah disepakati. Dukungan regulasi memberikan kepastian hukum untuk pelaksanaan setiap inisiatif dan aktivitas yang diselenggarakan Badan PPSDMP 5 (lima) tahun kedepan. Secara garis besar, terdapat 5 (lima) kebutuhan regulasi Badan PPSDMP 2025 – 2029. Kebutuhan regulasi tersebut dipetakan lebih rinci kedalam matriks kerangka regulasi pada **Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi**.

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Suburusan Penyuluhan).

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) disusun untuk memastikan terselenggaranya fungsi pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan pertanian nasional. Kelembagaan yang kuat menjadi landasan dalam pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis Kementerian Pertanian pada periode Renstra 2025–2029.

Penyusunan kerangka kelembagaan ini mempertimbangkan beberapa aspek pokok:

1. **Fungsi dan struktur organisasi**, yaitu memastikan pembagian peran yang jelas antara unit pusat dan daerah serta antarunit internal Kementerian Pertanian.
2. **Tata laksana antarunit organisasi**, yaitu memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan alur komando penyuluhan, pendidikan vokasi, serta pelatihan SDM pertanian.
3. **Pengelolaan SDM pertanian**, yaitu menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, kuantitas, dan kualitas penyuluh, petani, serta ASN pertanian.

Kerangka kelembagaan BPPSDMP dirancang berdasarkan kaidah:

1. Selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta visi Presiden.
2. Berlandaskan kebijakan dan regulasi yang berlaku, termasuk UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan, UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi organisasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan eksisting, khususnya terkait tumpang tindih kewenangan dan kekosongan fungsi kelembagaan.

Berdasarkan evaluasi kelembagaan saat ini, diperoleh sejumlah permasalahan SOTK dan kebutuhan desain organisasi sebagai berikut:

Tabel 1. Desain Kriteria dalam Kerangka Kelembagaan Badan PPSDMP 2025 – 2029

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain Kriteria yang Dibutuhkan Badan PPSDMP
1	Tugas dan Fungsi penyuluhan merupakan salah satu tugas dan fungsi di BPPSDMP, sedangkan kewenangan penyuluhan di daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah	Dibutuhkan unit kerja yang setingkat UKE 1 yang menangani penyuluhan dan pembinaan penyuluh nasional (<i>corporate university</i>)
2	Belum ada unit kerja yang khusus yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi secara umum	Butuh unit kerja setingkat eselon I yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi

Pendekatan kedua yaitu mengacu pada rumah strategi Kementerian Pertanian dimana Badan PPSDMP berkontribusi terhadap capaian pilar 7 (tujuh), yaitu **Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani**. Kontribusi optimal Badan PPSDMP dapat terwujud jika didukung oleh adanya unit kerja setingkat Eselon I yang menangani regenerasi petani dan pengembangan usaha tani. Peran UKE I tersebut sebagai *Corporate University* Kementerian Pertanian dengan desain

struktur organisasi berdasarkan fungsi. Rencana pengembangan UKE I tersebut fokus dalam menyelesaikan regenerasi petani dan pengembangan usaha tani dengan rincian sebagai berikut.

1. Penyuluhan pertanian dan pengembangan kompetensi penyuluh
2. Pembinaan Pendidikan formal di bidang pertanian
3. Pengembangan kompetensi SDM pertanian
4. Pembangunan kesadaran SDM pertanian
5. Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian

Berdasarkan analisis di atas, terdapat 2 (dua) desain organisasi yang dibutuhkan. Pertama yaitu jenis struktur *hybrid* antara struktur berbasis kelompok komoditas (Unit Eselon II teknis) dengan struktur berbasis fungsi (Dukungan Manajemen). Kedua yaitu Unit kerja setingkat eselon II (teknis) berdasarkan fungsi: (1) Penyuluhan dan pembinaan penyuluh, (2) Pengelolaan Pendidikan bidang pertanian, (3) Pengembangan kompetensi SDM Pertanian, (4) Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian.

Implikasi Strategis

1. **Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Teknis**
 - BPPSDMP berperan dalam penguatan kapasitas SDM, sedangkan Ditjen Teknis bertanggung jawab pada aspek produksi dan hilirisasi.
 - Kelembagaan baru akan memperjelas dukungan SDM terhadap keberhasilan program teknis (contoh: peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, penerapan teknologi).
2. **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah**
 - Fragmentasi kewenangan penyuluhan antara pusat dan daerah diatasi melalui kejelasan peran BPPSDMP sebagai pengendali mutu dan pembina standar nasional.
 - Pemda tetap menjalankan penyuluhan sesuai konteks wilayah, tetapi dengan standar dan kurikulum yang ditetapkan BPPSDMP.
3. **Integrasi dengan Program Strategis Nasional**
 - Desain kelembagaan Corporate University menjadikan BPPSDMP sebagai pusat pembelajaran nasional yang mengintegrasikan pendidikan vokasi, penyuluhan, pelatihan, serta riset terapan.
 - Hal ini memperkuat kontribusi terhadap sasaran strategis RPJMN, terutama dalam regenerasi petani dan peningkatan kelas usaha tani.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Berdasarkan **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023** tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029*, *target kinerja* diartikan sebagai penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Definisi ini berlaku untuk semua tingkatan indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, maupun indikator kinerja kegiatan. Penetapan target kinerja yang jelas diperlukan agar pencapaian tujuan dan sasaran dapat dievaluasi secara terukur dan akuntabel. Dengan kata lain, setiap indikator kinerja harus memiliki target kinerja yang menjelaskan secara kuantitatif hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Renstra.

Pendekatan perumusan target kinerja Badan PPSDMP 2025-2029 dilakukan melalui penerjemahan **pohon kinerja Kementerian Pertanian**. *Pohon kinerja* merupakan kerangka yang memetakan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya dalam lingkup Kementerian Pertanian. Langkah ini bertujuan memastikan **keselarasan vertikal** (antara sasaran program Badan PPSDMP dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian) dan **keselarasan horizontal** (antar program dan kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian). Dengan pendekatan tersebut, target kinerja Badan PPSDMP tersusun selaras dengan kerangka pencapaian kinerja Kementerian Pertanian, sehingga kontribusi Badan PPSDMP terhadap perwujudan visi dan misi Kementerian Pertanian dapat terjamin secara langsung.

Intermediate Outcome (Int.O) 1.1.1 "Bertumbuhnya usaha tani nasional" / Meningkatnya indeks harga yang diterima petani	Indikator Kinerja (IK): IK.1.1.1: Pertumbuhan volume usaha tani (%) / Peningkatan indeks harga yang diterima petani
---	---

Tabel 2. Target Kinerja Badan PPSDMP 2025 - 2029

Kode	Sasaran Program	Kode	Indikator Kinerja Program	Sat	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	1.1	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Badan PPSDMP 2025-2029 dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran program, yaitu **"Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani"**. Pencapaian sasaran program tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja program, yakni **"Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas"**, dengan satuan persen (%). Target pertumbuhan yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 1% setiap tahun, mulai tahun 2025 hingga 2029. Target sebesar 1% per tahun tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi awal (baseline) serta

kapasitas intervensi program yang tersedia. Pencapaiannya akan didukung melalui berbagai kegiatan strategis Badan PPSDMP yang difokuskan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan skala usaha pelaku usaha tani.

Sasaran program dan indikator kinerja tersebut merepresentasikan upaya peningkatan skala usaha pertanian secara positif. Indikator "pelaku usaha tani yang naik kelas" mengukur persentase pelaku usaha tani (petani atau pemilik usaha di bidang pertanian) yang berhasil meningkatkan kelas atau kategori skala usahanya ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya. Sebagai contoh, pelaku usaha tani yang semula memiliki usaha berskala kecil kemudian berhasil meningkat menjadi usaha berskala menengah dikategorikan telah naik kelas dalam skala usahanya. Kenaikan kelas tersebut juga merefleksikan peningkatan kapasitas usaha tani yang diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha tani.

Istilah "kelas" dalam konteks usaha tani merujuk pada klasifikasi tingkat atau kapasitas usaha tani berdasarkan kriteria atau instrumen pengukuran tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati. Klasifikasi ini digunakan untuk menilai tingkat kemajuan atau kemampuan pelaku usaha tani dalam mengelola usahanya, terutama dari segi skala bisnis dan kinerja usahanya. Dengan adanya klasifikasi kelas usaha tersebut, kemajuan setiap pelaku usaha tani dapat dipantau dan diukur secara sistematis dari waktu ke waktu.

Cakupan **usaha tani** yang dimaksud dalam sasaran program ini melingkupi berbagai subsektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan), dengan jenis kegiatan usaha yang beragam, antara lain:

1. penyediaan sarana produksi pertanian;
2. kegiatan produksi atau budidaya;
3. penanganan hasil pascapanen;
4. pengolahan hasil pertanian;
5. pemasaran hasil pertanian;
6. jasa penunjang di bidang pertanian.

Seluruh jenis usaha di atas termasuk dalam lingkup yang menjadi fokus peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani melalui program-program Badan PPSDMP. Hal ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh rantai nilai sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Dengan menetapkan sasaran dan indikator kinerja tersebut, Badan PPSDMP berupaya mendorong transformasi pelaku usaha pertanian ke skala usaha yang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian, terutama dalam meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan kesejahteraan petani serta pelaku agribisnis secara berkelanjutan.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjabaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target, sasaran, dan indikator kinerja Badan PPSDMP periode 2025–2029. Kerangka ini menggambarkan estimasi total dana yang dibutuhkan selama lima tahun tersebut untuk mewujudkan sasaran strategis. Selain itu, kerangka pendanaan menguraikan alokasi pendanaan per tahun sesuai rencana strategis, sehingga dapat memastikan kecukupan dana untuk setiap tahap pencapaian target.

Selain memaparkan besarnya kebutuhan pendanaan, kerangka pendanaan juga menjelaskan sumber-sumber pendanaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sumber pendanaan utama meliputi:

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN):** bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
- **Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU):** skema kemitraan pemerintah dengan pihak swasta (public-private partnership) untuk pembiayaan program strategis.
- **Corporate Social Responsibility (CSR):** kontribusi pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Pemerintah menyadari pentingnya dukungan pihak non-pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, skema pendanaan alternatif seperti KPBU dan CSR dikembangkan sebagai upaya melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pendanaan program-program strategis. Keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah ini diharapkan dapat menutup kesenjangan pendanaan, mengingat keterbatasan kemampuan APBN dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

Kerangka pendanaan Badan PPSDMP 2025–2029 selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1 Renstra, yang memuat matriks kebutuhan pendanaan beserta rencana pencapaian target kinerja untuk setiap program. Dengan kerangka pendanaan tersebut, diharapkan alokasi dan distribusi dana dapat dikelola secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Penyusunan **Rencana Strategis Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian** merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah dengan rentang waktu lima tahun. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan mengacu pada *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029*. Proses penyusunan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat global maupun nasional, yang memengaruhi arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian.

Analisis lingkungan strategis menunjukkan adanya potensi sekaligus ancaman yang perlu diantisipasi. Pada skala global, terdapat dua tren utama. Pertama, peningkatan populasi dunia yang berbanding lurus dengan kebutuhan konsumsi pangan. Kedua, penurunan jumlah pekerja sektor pertanian global. Kedua hal ini bersifat kontradiktif, sehingga peningkatan produktivitas menjadi tantangan yang mendesak untuk dijawab. Pemanfaatan teknologi modern sebagai solusi peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya masih menghadapi kendala, mengingat dominasi petani usia lanjut di Indonesia dan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Arah kebijakan pemerintah ke depan terhadap pembangunan pertanian juga semakin jelas. Ketahanan pangan menjadi salah satu cita-cita jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sejumlah program yang dicanangkan dalam lima tahun mendatang berhubungan erat dengan peningkatan produksi komoditas strategis pertanian. Hal ini menuntut adanya prasarana, sarana, serta SDM pertanian yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Badan PPSDMP sebagai *leading sector* dalam peningkatan kualitas SDM pertanian nasional menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan tersebut antara lain peningkatan kebutuhan produksi pangan, persepsi negatif masyarakat mengenai sektor pertanian, ketidakselarasan antara program penyuluhan pemerintah pusat dan daerah, serta tuntutan adopsi teknologi dalam kerangka pertanian 4.0. Menjawab hal tersebut, Badan PPSDMP menetapkan visi 2025–2029:

“SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi rakyat Indonesia, dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan modal manusia yang unggul dan modal organisasi yang proporsional. Agar arah kebijakan, kapasitas SDM, dan organisasi sebagai unsur pembentuk institusi dapat berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan penyelarasan dengan sistem nilai Badan PPSDMP, yaitu:

- **Inklusif**, bermakna setiap kebijakan dan program membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
- **Profesional**, bermakna seluruh kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dilaksanakan dengan standar kompetensi tinggi, berbasis ilmu pengetahuan, akuntabel, dan berintegritas.
- **Modern**, bermakna pengelolaan SDM pertanian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi, dan pendekatan berbasis data agar adaptif terhadap tantangan masa depan.

Rencana Strategis Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif dalam memaksimalkan potensi sekaligus menjawab tantangan jangka menengah. Visi yang telah dirumuskan menjadi tujuan bersama yang harus dipahami oleh seluruh jajaran organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana teknis di lapangan. Kontribusi setiap individu maupun unit akan menjadi dasar pelaksanaan program dan inisiatif harian yang selaras dengan cita-cita jangka menengah Badan PPSDMP dan Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029.

DRAFT

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BADAN PPSDMP 2025 – 2029

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN PERTANIAN									51.343.768,01	65.519.648,97	65.772.756,34	65.819.061,93	68.663.889,35	Menteri Pertanian
SS.1		Meningkatnya pendapatan petani							951.626	8.571.753	9.050.437	9.490.869	9.978.129	BPPSDMP
	IKSS 1.2	Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian	%	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3						
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BADAN PPSDM PERTANIAN									677.998	2.766.154	3.194.838	3.585.270	4.022.530	
SP1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani													BPPSDMP
	IKSP1.1	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%	1	1	1	1	1						
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN									161.096	569.375	616.481	675.384	740.243	
SK.1	Meningkatnya kompetensi petani													Pusat Pelatihan Pertanian
	IKSK 1.1	SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%)	%	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40						
SK.2	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan)													Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian
	IKSK 2.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur)	%	20	18	16	14	12						

	IKSK 2.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur)	%	25	23	21	19	17						
--	-------------	--	---	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--

DRAFT

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)													- Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) - Balai Pelatihan Pertanian (BPP)
	IKSK 3.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	%	20	18	16	14	12						
	IKSK 3.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	%	25	23	21	19	17						
SK.4	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan													- BBPMKP - BBPP - Bapeltan
	IKSK 4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert	4	4,1	4,2	4,3	4,4						
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN									107.523,84	1.483.652,72	1.657.398,65	1.909.764,37	2.183.047,32	
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian													Pusat Penyuluhan Pertanian
	IKSK 1.1	Persentase penyuluh yang meningkat kompetensinya dibanding total penyuluh (ASN) (%)	%	6	7	8	9	10						
SK.2	Meningkatnya jumlah petani millennial													Pusat Penyuluhan Pertanian
	IKSK 2.1	Persentase Petani muda terhadap total petani* (data dari Simluhtan) (%)	%	22,03	22,13	22,23	22,33	22,43						

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN									367.637	414.310	586.820	630.650	674.340	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian													Pusat Pendidikan Pertanian
	IKSK 1.1	Persentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian (%)	%	80	80,10	80,20	80,20	80,20						
SK.2	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi Pertanian													UPT Pendidikan
	IKSK 2.1	Persentase lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian terhadap total lulusan	%	80	80,10	80,20	80,20	80,20						

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN									41.741	298.816,55	334.138,21	369.472,03	424.899,23	
SK.1	Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian													
	IKSK 1.1	Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian	%	80	82	84	86	88						Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian
	IKSK 2.1	Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian	%	25	50	60	70	80						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									273.628	5.805.599	5.855.599	5.905.599	5.955.599	
SP.1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel													
	IKSP 1.1	Indeks tata kelola birokrasi Badan PPSDMP	Indeks (0-100)	77,98	78,00	78,02	78,04	78,06						
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA									273.628	5.805.599	5.855.599	5.905.599	5.955.599	
SK.1	Ditindaklanjutnya hasil temuan pengawas intern													Sekretariat Badan PPSDMP
	IKSK 1.1	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan	%	90,0	90,4	90,6	90,8	91,0						

[illegible]

	IKSK 6.1	Persentase pelaksanaan renaksi RB terhadap total rencana aksi RB sesuai kewenangan masing-masing ES I	%	100	100	100	100	100						
--	-------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

DRAFT

Program/ Kegiatan		Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.7		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian							21.062	25.485	28.033	30.837	33.92	Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
	IKSK 7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian	Skala Likert	3,56	3,58	3,6	3,62	3,64						
SK.8		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian							5.904,64	8.542,46	9.396,71	10.336,38	11.370,02	Museum Tanah dan Pertanian
	IKSK 8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian	Skala Likert	3,56	3,58	3,6	3,62	3,66						